

e-news letter

JULI IV 2020

PKS PARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

Baleg Gelar Rapat
RUU Ciptaker
Saat Masa Reses

**PKS TOLAK
HADIR**



Regulasi Adalah Sumbu Keberpihakan

Secara substansial reses adalah untuk menyerap aspirasi, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada masyarakat di daerah pemilihan Anggota (Pasal 239).

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menurut Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib dalam satu tahun sidang melakukan 4 (empat) atau 5 (lima) kali masa persidangan sesuai dengan keputusan Badan Musyawarah, meliputi masa sidang dan masa reses (Pasal 249).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 "Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja." Secara substansial reses adalah untuk menyerap aspirasi, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada masyarakat di daerah pemilihan Anggota (Pasal 239).

Menurut pasal 254 ayat 7 dimungkinkan dilakukan sidang di masa reses dengan prasyarat dalam hal jenis rapat DPR dilaksanakan secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dilaksanakan pada

masa reses, jenis rapat DPR dilaksanakan atas persetujuan Pimpinan DPR. Kepemimpinan DPR adalah salah satu Koentji kemana sumbu keberpihakan parlemen diuji.

Atas dasar itu tentu saja dalam peran otoritatif para pengambil keputusan harus memperhatikan sejumlah aspek yang konideran utamanya adalah kepentingan publik, penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebagaimana kita ketahui keputusan politik dirumuskan tidak ruang hampa dan bebas makna. Pasti ada motif dan muasal sebab atasnya hadir sebuah keputusan. Tidak masalah, sepanjang tidak bermasalah aturan dan prosedurnya. Tidak mengapa, sepanjang semua diputuskan berdasarkan rasa keadilan dan etika politik yang luhur. Koentji-nya pada keberpihakan terhadap rakyat.

Atas dasar alasan reses pembatalan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kasus

buron Djoko Tjandra yang dilakukan oleh Komisi III dengan aparat penegak hukum seperti Polisi, Kejaksaan dan Kemenkumham. Padahal disaat yang bersamaan secara 'marathon' pembahasan RUU Ombinus Law Cipta Kerja dilakukan dengan dua kali menerabas masa Reses.

Sehingga pada akhirnya proses pembahasan tidak berjalan maksimal, karena sebagian besar Anggota DPR sedang menyambang konstituen. Pun yang harusnya bertemu dan menyerap aspirasi bersama masyarakat tidak maksimal karena harus ikut rapat. Percayalah semua yang setengah-setengah tidak akan maksimal dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Saat ini juga harus menjadi momentum memperbaiki relasi DPR dengan Pemerintah, mengembalikan ke 'khittah' sebagai Lembaga perwakilan rakyat. Bukankah selama ini DPR selalu mengalah dengan kemauan Pemerintah, buktinya apa yang diinginkan hampir semua disetujui. Sebut saja Perppu 1 tahun 2020 karena didalamnya banyak hal yang janggal, potensi kerugian negara, moral hazard dan sejenisnya akhirnya lolos juga. Dari tidak bisa menjadi bisa. Yang rumit menjadi mudah, diskresi diberikan dan



bagbagai insentif lainnya dipersilahkan. Pun rancangan prolegnas yang tidak kurang setengah usulan dari Pemerintah. Pemerintah seakan tidak cukup sebagai pemegang kuasa anggaran, kini seakan hendak beranjak menjadi 'kuasa aturan'. Perhatikan saja statement Presiden Jokowi yang siap menggelon-torkan berbagai Perppu, aturan yang diperlukan dan membubarkan Lembaga negara. Yang sangat mungkin Lembaga-lembaga tersebut dibentuk menurut amanat UU yang disahkan di senayan.

Jadi saat bersidang dan reses, sumbu keberpihakan

adalah untuk rakyat. Jika rakyat melihat kegelisahan penegakan hukum terkait Djoko Tjandra maka sudah sepatutnya digelar pengungkapan kasus dengan segera meski di masa reses. Namun jika rakyat melihat bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja kontraproduktif ditengah penanganan pagebluk Covid 19 yang terus meningkat, mengapa harus dipaksakan. Karena sebagai lembaga perwakilan rakyat DPR harus menjadi amplifikator dan agregator bagi kepentingan rakyat. Karena DPR awalnya dan akhirnya Kembali ke Rakyat.

Humas Fraksi PKS DPR RI

Baleg Gelar Rapat RUU Ciptaker Saat Reses, PKS Tolak Hadir

alasan yang paling banyak dikemukakan terkait revisi UU No. 28 Tahun 2002 adalah banyaknya tumpang tindih aturan, namun Pemerintah tidak dapat membuktikan satu ayat pun dari UU No. 28 Tahun 2002 ini yang tumpang tindih dengan UU lainnya.

H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (22/07) — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Bukhori Yusuf mengatakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak menghadiri rapat Baleg pada masa reses. Baleg DPR pada hari ini menjadwalkan rapat RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

"Ya, benar, tetapi PKS enggak hadir karena masa reses," ujar Bukhori melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu (22/7).

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat pun mengkritisi langkah pemerintah dan Baleg DPR RI yang tetap menggelar rapat pembahasan RUU Ciptaker pada masa reses.

"Bahkan di masa reses

'dikebut' untuk dibahas seperti yang terjadwal pada hari ini (Rabu, 22/7)," kata Syahrul Aidi Maazat di Jakarta, Rabu.

Syahrul menilai, seharusnya pemerintah tetap fokus dalam menyelesaikan persoalan pandemi Covid-19 bukan malah membahas RUU Ciptaker.

Syahrul mengatakan, RUU Ciptaker mengangkat persoalan klasik yang sering dituding sebagai penyebab lemahnya investasi yang masuk ke Indonesia yaitu lamanya proses perijinan yang menurut pemerintah adalah akibat banyaknya syarat yang harus dipenuhi oleh investor sebelum mereka dapat menanamkan modalnya di Indonesia.

Sebagai solusinya menurut

dia, pemerintah menggadag-gadag RUU Ciptaker dapat menjawab persoalan tersebut dan mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa sedikitpun memberikan bukti berapa pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan akan dicapai jika RUU itu berhasil disetujui DPR.

"Selain itu draf RUU dan Naskah Akademik (NA) pun terkesan dipaksakan untuk segera masuk dan dibahas. Banyak sekali inkonsistensi dan ketidakjelasan konsep dalam draf dan NA RUU Cipta Kerja, RUU ini akan merevisi 78 UU namun argumentasi yang diberikan sangat sedikit," ujarnya.

Dia mencontohkan, salah satu UU yang akan direvisi melalui RUU Cipta Kerja ini adalah UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dalam RUU itu, 80 persen substansi UU No. 28 Tahun 2002 akan direvisi, 60 persen diantaranya merupakan penghapusan materi muatan UU.

Menurut dia, alasan yang paling banyak dikemukakan terkait revisi UU No. 28 Tahun 2002 adalah banyaknya tumpang tindih aturan, namun Pemerintah tidak dapat membuktikan satu ayat pun dari UU No. 28



Tahun 2002 ini yang tumpang tindih dengan UU lainnya.

"Selain itu Pemerintah tidak memberikan argumentasi yang cukup dalam Naskah Akademik karena hanya menyediakan penjelasan sebanyak 1,5 halaman. Padahal dapat dibayangkan, sebuah UU yang separuh isinya dihapuskan sudah pasti kehilangan ruh pengaturannya," katanya.

Syahrul menjelaskan, walaupun pemerintah menjanjikan aturan yang dihapus akan dipindahkan ke dalam PP, tetapi akibat kelemahan itu justru dapat berakibat pada ketidakpas-

tian berusaha bagi pengusaha sebab aturan-aturan ini dapat saja sewaktu-waktu diubah kembali karena tidak memiliki kekuatan seperti dalam UU.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pada hari ini Baleg DPR RI menggelar Rapat Panitia Kerja (Panja) melanjutkan pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja Bab III terkait Peningkatan Ekosistem investasi dan Kegiatan Berusaha. Rapat tersebut berlangsung secara fisik dan virtual, di Kompleks Parlemen, Jakarta.



SIKAP PKS JELAS SEJAK AWAL MEMILIH JALAN SEPI BERNAMA OPOSISI

Bukan karena tersisih dari kompetisi atau berbeda karena emosi. Kemudian mengambil pandangan politik asal beda, asal tidak sama. Tidak. Fraksi PKS menjaga jarak dengan penguasa, dalam kesadaran penuh menjadi penyeimbang yang konstruktif dan substantif untuk kesejahteraan Rakyat.



Jangan Abaikan Peran Muhammadiyah & NU sebagai Organisasi Penggerak Pendidikan

“Anggaran penggerak pendidikan ini jangan sampai jadi sekedar hibah untuk pihak swasta, yang belum jelas kontribusinya di bidang pendidikan. Pemerintah harusnya lebih hati-hati soal pemakaian APBN, ini era darurat Corona

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

Jakarta (24/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengkritik Program Organisasi Penggerak Kemendikbud yang lemah dalam proses verifikasi dan validasi, sehingga mengakibatkan penolakan dari Muhammadiyah dan NU, yang merupakan organisasi massa terbesar di Indonesia yang berjasa dalam menggerakkan dan mengelola pendidikan di Indonesia.

Pria yang akrab disapa HNW ini meminta Kemendikbud mendengar masukan dari masyarakat, termasuk dari dua ormas besar Muhammadiyah dan NU, yang menyatakan bahwa program dengan total anggaran Rp 595 Miliar tersebut sebaiknya melibatkan lembaga

yang kredibel dan telah terbukti berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

“Anggaran penggerak pendidikan ini jangan sampai jadi sekedar hibah untuk pihak swasta, yang belum jelas kontribusinya di bidang pendidikan. Pemerintah harusnya lebih hati-hati soal pemakaian APBN, ini era darurat Corona!”, demikian disampaikan Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta (23/07/2020).

Hidayat mengingatkan bahwa 30-40% pembiayaan negara di masa Pandemi ini berasal dari Utang, dikarenakan defisit yang semakin melebar hingga lebih dari Rp 1000 Triliun sesuai Perpres 72/2020. “Diperlukan langkah peng-

gunaan anggaran yang hati-hati, efisien, tepat guna dan pruden, terutama untuk program dengan anggaran yang melimpah,” terang Wakil Ketua MPR RI ini

Menurutnya, anggaran untuk Organisasi Penggerak Pendidikan sebesar Rp 595 Miliar di Kemendikbud adalah sangat besar, dibandingkan misalnya anggaran untuk Lembaga/Ormas di Kementerian Agama yang hanya sekitar Rp 75 Miliar.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi PKS ini meminta Kemendikbud lebih peka dan hati-hati, apalagi ditemukan ada beberapa Lembaga yang berafiliasi dengan dana CSR Perusahaan, seperti Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation, tapi malah menerima “hibah” kelas gajah dari program ini.

Mundurinya Muhammadiyah dan NU dari program tersebut, imbuhnya, harus menjadi evaluasi serius bahwa ada yang tidak beres dalam proses dan pengambilan keputusannya, apalagi kabarnya dalam proses verifikasi, tidak menggugurkan satu pun dari 183 lembaga calon penerima.

“Memang perlu pemeratan dan keadilan. Tetapi dalam konteks itu juga, mengabaikan



peran Muhammadiyah, NU, dan beberapa ormas besar lain telah bergerak dan terbukti sukses di bidang Pendidikan sebelum Kemendikbud berdiri, adalah ketidakbijakan yang harusnya tidak terjadi,” tegas Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.

HNW berpesan jangan sampai peran dan pendapat Muhammadiyah dan NU diabaikan, dengan track record yang mensejajarkan itu tidak dipentingkan, apalagi ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan

anggaran tinggi di masa pandemi.

“Justru melibatkan organisasi-organisasi besar yang telah terbukti jasa dan kinerjanya dlm menggerakkan dan memajukan Pendidikan seperti Muhammadiyah, NU dan lainnya, akan lebih membantu Kemendikbud untuk merealisasikan program-program pendidikan dan tenaga didik yang lebih baik dan lebih maju, sekalipun di era darurat kesehatan pandemi covid-19,” pungkas Anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta II ini.

Penghapusan Palestina dari Peta Google & Apple

HNW: Kian Menguatkan Penjajahan Israel

Yang dilakukan oleh Google dan Apple bila tak segera dikoreksi, akan melanggengkan penjajahan Israel dan menjauhkan hadirnya negara Palestina yang merdeka. Itu artinya juga melanggengkan ketidakdamaian dan terorisme disana

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.

Wakil Ketua MPR RI

Jakarta (21/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengkritisi Google yang kembali membuat ulah karena bertentangan dengan konvensi Internasional.

Kali ini, lanjut Hidayat, ulah Google diikuti juga oleh sejawatnya yakni Apple, yaitu dengan menghapus atau tidak mencantumkan Palestina dalam penamaan negara pada peta daring yang mereka buat.

Dan yang mereka tampilkan disana, katanya, adalah sebutan atau nama Israel, bahkan di kawasan-kawasan yang diakui PBB dan organisasi-organisasi internasional yang lain, bahwa kawasan itu adalah di ba-

wah teritorial negara Palestina.

"Kelakuan Google dan Apple dua raksasa dunia rujukan informasi daring ini, bisa jadi merupakan langkah terselubung Israel," ungkap pria yang akrab disapa HNW ini.

HNW menambahkan, langkah tersebut bisa jadi beriringan dengan langkah-langkah brutal dan teror Israel yang terus melanjutkan pembangunan dan aneksasi di kawasan Tepi barat dan kawasan-kawasan lain yang masih di bawah otoritas Palestina.

"Sekalipun dunia Internasional mengancam dan menolaknya, sangat wajar bila Otoritas Palestina menolak 'kejahatan'

Google dan Apple yang menghapus Palestina dan menggantikannya dengan Israel," tandasnya.

Dan menurut Wakil Ketua MPR ini sangat wajar, bila pihak Palestina mengadukannya ke Mahkamah Internasional maupun PBB.

"Karena Palestina diakui eksistensinya dalam Sidang Umum PBB, dengan nama dan simbol negaranya. 135 Negara Anggota Sidang Umum PBB memutuskan status Palestina sebagai Anggota Pengamat di Sidang Umum PBB. Demikian juga OKI, UNESCO, Mahkamah Internasional dan lembaga-lembaga Internasional lainnya," pungkasnya.

Karenanya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menyampaikannya, seharusnya Pemerintah Indonesia yang tidak mengauki penjajahan Israel, dan mendukung kemerdekaan Palestina, penting juga untuk segera membantu Palestina.

"Kita harus sama-sama mengoreksi blundernya Google dan Apple yang telah menghapus Palestina dan menggantikannya dengan Israel



dengan mengembalikan peta daring yang benar, yaitu peta yang tetap menyebutkan nama negara Palestina," tandasnya.

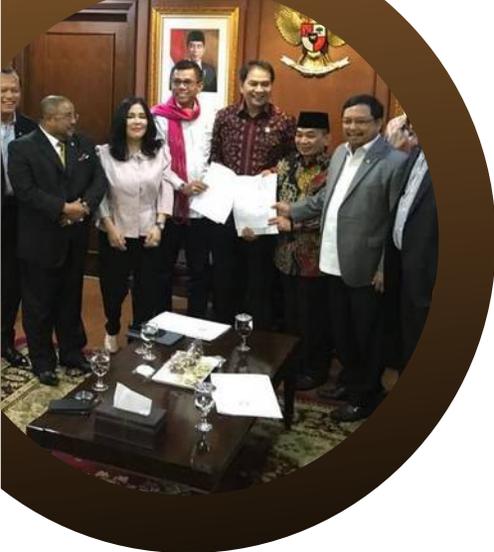
Indonesia, kata HNW, bisa mengajak negara-negara OKI, juga anggota Sidang Umum PBB, bahkan sebagai anggota (tak tetap) Dewan Keamanan (DK) PBB.

"Indonesia bisa memprakarsai langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengembalikan nama Palestina sebagai Negara berdaulat dan meyakinkan Google serta Apple untuk menyebutkan kembali nama Palestina, dan agar kesalahan yang sama tak diulangi pada masa berikutnya," papar Anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Apay yang sudah kita upayakan tersebut, lanjutnya, tentunya sebagai langkah-

langkah kongkret untuk secara bertahap menghadirkan perdamaian di kawasan, dan pengakuan penuh atas eksistensi Palestina sebagai Negara Merdeka dan Berdaulat, yang keberadaannya pasti terpaterikan pada realita nama pada peta dunia baik yang daring maupun non daring.

"Yang dilakukan oleh Google dan Apple bila tak segera dikoreksi, akan melanggengkan penjajahan Israel dan menjauhkan hadirnya negara Palestina yang merdeka. Itu artinya juga melanggengkan ketidakdamaian dan terorisme disana. Suatu hal yang bertentangan dengan resolusi PBB dan konvensi-konvensi Internasional lainnya," tutup Anggota DPR RI Dapil Jakarta dan Luar Negeri ini.



USULAN PANSUS JIWasRAYA

Sudah Sampai Mana?



Hak Angket Diusulkan dan ditandatangani oleh **50 Anggota Fraksi PKS dan 54 Anggota Fraksi Partai Demokrat**



Usulan Pansus Hak Angket Jiwaseraya diterima oleh pimpinan DPR RI 4 Februari 2020



Sudah **170 hari berlalu (5 bulan)** tidak ada kabar hingga hari ini Pimpinan bersama Badan Musyawarah belum pernah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna DPR atas usulan hak angket

KETENTUAN

PENGAJUAN HAK ANGKET

UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).

Pasal 199

(1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

Pasal 200

(1) Usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada semua anggota.

Terkait Perpres Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Sukamta: Jangan Jadi Pepesan Kosong

Saya berharap ini jangan hanya sekedar ganti nama, karena Pemerintah sekarang kayaknya baru suka ganti-ganti istilah. Lontarkan istilah New Normal kemudian diralat jadi adaptasi kebiasaan baru. Istilah PDP, ODP, OTG diganti dengan suspek, kontak erat dan konfirmasi Covid. Sekarang giliran Gugus Tugas diganti istilah jadi Satuan Tugas

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Yogyakarta (23/07) — Presiden Joko Widodo membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk kemudian dibentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 berlaku mulai 20 Juli 2020.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta menyebut langkah perubahan ini bisa tidak efektif jika Presi-

den tidak memperbaiki persoalan substansi dalam penanganan Covid-19 beserta dampaknya. Demikian tanggapan melalui pesan tertulis disampaikan kepada media (22/07/2020).

"Saya berharap ini jangan hanya sekedar ganti nama, karena Pemerintah sekarang kayaknya baru suka ganti-ganti istilah. Lontarkan istilah New Normal kemudian diralat jadi adaptasi kebiasaan baru. Istilah

PDP, ODP, OTG diganti dengan suspek, kontak erat dan konfirmasi Covid. Sekarang giliran Gugus Tugas diganti istilah jadi Satuan Tugas. Jika hanya ganti nama tanpa ada substansi yang diperbaiki, maka ini akan sia-sia dan hanya jadi pepesan kosong," ungkapnya.

Sukamta menyebutkan bahwa pada bulan Mei dirinya pernah sebutkan ada 5 persoalan mendasar dalam penanganan Covid-19 di Indonesia sebagai kritik atas wacana pelonggaran PSBB yang sering disampaikan pemerintah.

Pertama tidak adanya grand desain, Kedua, persoalan koordinasi pemerintah, Ketiga, kurangnya kapasitas uji spesimen, keempat, kesenjangan sarana prasarana (sarpras) kesehatan di setiap daerah dan SDM tenaga kesehatan, kelima pelaksanaan PSBB yang tidak optimal dan kedisiplinan masyarakat yang masih rendah. Menurut Sukamta, hingga detik ini kelima persoalan mendasar tersebut masih saja berlangsung.



"Sebut saja persoalan kedua soal koordinasi. Sekretaris Kabinet Pramono Anung bilang, di dalam Perpres ini semuanya bertanggung jawab kepada presiden, jadi presiden langsung yang mengendalikan, memonitor, mengontrol semua kebijakan terkait Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dulu dalam Keppres Gugus Tugas, semua juga bertanggung jawab kepada Presiden. Lha, yang kemarin Presiden kemana saja? Apakah dengan Perpres ini akan ada jaminan Presiden menjadi lebih aktif, koordinasi juga menjadi lebih baik? Saya kira tanpa Perpres pun, jika mau Presiden bisa mengambil inisiatif," tandas Sukamta.

Lebih lanjut anggota DPR RI asal Yogyakarta menyebut akan jika ada hal baru dalam

Perpres ini adalah adanya tim pemulihan ekonomi. Namun demikian Sukamta memandang Perpres ini masih setengah hati dalam soal pemulihan ekonomi nasional karena tidak adanya upaya untuk membentuk tim pemulihan ekonomi di tingkat daerah.

"Dalam soal penanganan Covid-19, di daerah juga dibentuk satuan tugas. Tetapi dalam soal pemulihan ekonomi hanya dibentuk tim di level pusat. Padahal dampak pandemi ini secara ekonomi juga dirasakan sampai daerah. Banyak sektor ekonomi rakyat di daerah yang sekarang mati suri. Ini jelas kebijakan yang masih sepotong-sepotong," tegasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Pemerintah diminta Berikan Insentif Industri Media Terdampak Pandemi

“Prinsip keadilan dan transparansi harus diterapkan pada teknis pelaksanaan. Dewan Pers dan Industri media harus mengawasi pelaksanaannya. Kemudian jika ada penyimpangan pada teknis pelaksanaannya diharapkan bisa segera menyampaikan kepada Komisi I DPR atau Fraksi PKS”

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Tasikmalaya (28/07) -- Menanggapi kebijakan Pemerintah yang akan memberikan Insentif kepada Industri media guna mengatasi dampak pandemi Covid-19, Anggota Komisi I DPR RI asal Partai Keadilan Sejahtera, Toriq Hidayat, menyampaikan bahwa kebijakan Pemerintah memberikan Insentif terhadap Industri media saat ini memang sudah sepatutnya dilakukan.

“Sudah sepatutnya Pemerintah memperhatikan keberlangsungan industri media dan awak pers. Berlangsungnya

pandemi hingga saat ini membuat perekonomian terus melemah. Berdasarkan data, hingga Mei lalu 50 persen perusahaan yang bergerak di industri media telah memotong gaji karyawannya. Ancaman pemutusan hubungan kerja untuk karyawan perusahaan media menjadi semakin nyata seiring dengan penurunan performa bisnis industri media nasional secara drastis,” ungkap Toriq.

Sejak April lalu, Dewan Pers telah menyampaikan aspirasi dari para pemilik

industri media kepada Komisi I DPR RI tentang Insentif kepada industri media yang dianggap dapat menyelamatkan hidup pers nasional yang sedang menghadapi krisis ekonomi serius akibat pandemi Covid-19. Aspirasi ini disampaikan pada saat rapat kerja (20/4/20).

Aspirasi yang disampaikan diantaranya, Pertama, kata Toriq, Mendorong Pemerintah mengalokasikan dana sosialisasi kebijakan, program, atau kampanye penanggulangan Covid-19, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk perusahaan pers nasional.

“Kedua, Mendorong Pemerintah untuk memberikan subsidi harga kertas bagi perusahaan pers cetak sebesar 20% dari harga per kilogram komoditas tersebut,” pungkasnya.

Ketiga, katanya, Mendorong Pemerintah memberikan subsidi biaya listrik untuk perusahaan pers sebesar 30% dari tagihan per bulan pada periode Mei - Desember 2020.

“Ke-empat, Mendorong Pemerintah memberikan kredit



berbunga rendah dan berjangka panjang melalui bank BUMN untuk perusahaan pers,” tambahnya.

Kelima, katanya, mendorong Pemerintah menanggukkan kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS ketenagakerjaan selama masa pandemi Covid-19, tanpa mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh karyawan.

“Ke-enam, mendorong Pemerintah menanggung kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS Kesehatan selama masa

pandemi Covid-19,” terangnya.

Ketujuh, lanjutnya, Mendorong Pemerintah memaksimalkan pemungutan pajak pendapatan dari perusahaan platform global yang beroperasi di Indonesia seperti antara lain Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Microsoft, dll. Komponen atau hasil pemungutan pajak pendapatan ini penting untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan setara, serta layak dialokasikan untuk mengembangkan dan menyelamatkan institusi jurnalisme di negeri ini.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

RUU Cipta Kerja Masih Belum Pro Rakyat

Politisi PKS: Hentikan Pembahasan!

Jika peruntukan pembangunan untuk MBR maka Langkah pemberian hak pakai tepat karena dapat meringankan beban sewa masyarakat. Apabila Rusun tersebut dibangun oleh Pemerintah atau Pemda untuk MBR, maka pemberian Hak Pakai menjadi tepat. Karena masyarakat tidak lagi dibebani masalah biaya sewa tiap bulannya”

KH. AUS HIDAYAT NUR

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (25/07) — RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas oleh DPR banyak menuai polemik. Banyaknya pertentangan RUU ini ditengarai karena banyaknya pasal yang tidak pro rakyat.

Tidak berpihaknya RUU ini pada rakyat kecil bahkan membuat berbagai elemen masyarakat secara bergiliran turun kejalan sejak Januari 2020. Beberapa pasal bermasalah tersebut adalah Warga Negara Asing dapat (WNA) dapat memperoleh hak milik Satuan Rumah Susun

(Sarusun) dan diberikannya Hak Pakai untuk pembangunan Rumah Susun.

Dalam draft RUU Cipta Kerja pasal 137 ayat 1 menyebutkan WNA bisa mendapatkan Hak Milik Satuan Rumah Susun.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur menyebut pasal ini menciderai tekad rakyat Indonesia yang ingin berjaya ditanahnya sendiri.

“Berdasarkan Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 tahun

1960 Pasal 21 disebutkan, hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik. Ini bertentangan dengan prinsip dasar UUPA 5/1960 tersebut, karena memungkinkan WNA bisa memiliki aset bangunan di Indonesia”, kata Aus Hidayat Nur pada Jumat (25/07/2020).

Selain pasal di atas, pasal 138 ayat 1 huruf b menyebutkan diberikannya Hak Pakai untuk pembangunan Rumah Susun (Rusun) yang dibangun di atas Hak Pengelolaan dapat diberikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

“Realita saat ini, tidak semua rusun itu diperuntukkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tapi masih banyak berorientasi pada keuntungan, maka pemberian Hak Pakai hanya akan memperkaya investor”, ujar Aleg PKS dari Kalimantan Timur tersebut.

Aus menambahkan jika peruntukan pembangunan untuk MBR maka Langkah pemberian hak pakai tepat karena dapat meringankan



beban sewa masyarakat.

“Apabila Rusun tersebut dibangun oleh Pemerintah atau Pemda untuk MBR, maka pemberian Hak Pakai menjadi tepat. Karena masyarakat tidak lagi dibebani masalah biaya sewa tiap bulannya”, tambahnya.

Namun jika masih banyak

pasal-pasal yang tidak berubah dan tidak pro rakyat dalam RUU Cipta Kerja nantinya, Aus menegaskan sebaiknya hentikan saja pembahasannya.

“Jika masih tidak ada perubahan dalam RUU ini, sebaiknya dicabut saja”, tegasnya.

Terkait Pembakaran Foto Habib Rizieq

Aleg PKS Minta Polisi segera Bertindak dan Tak Berat Sebelah

Seharusnya aparat bertindak sigap dengan kondisi saat ini, jangan sampai polisi terlihat cekatan ketika menerima laporan dari satu pihak. Sedangkan kalau ada laporan dari pihak lain terlihat kurang sigap atau bahkan slow respons

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (29/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Aboebakar Al-Habsy menanggapi dengan tegas terkait pembakaran dan perobekan foto Habib Rizieq Shihab di depan gedung parlemen, beberapa hari lalu.

Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe ini, aksi pembakaran foto Habib Rizieq adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi, hal itu seharusnya tidak boleh dilakukan dalam sebuah aksi unjuk rasa.

"Tindakan tersebut termasuk perbuatan menyatakan permusuhan dan kebencian. Seharusnya aparat memproses mereka dengan pasal 156 KUHP," tegas Anggota Komisi III DPR RI ini.

"Seharusnya aparat

bertindak sigap dengan kondisi saat ini, jangan sampai polisi terlihat cekatan ketika menerima laporan dari satu pihak. Sedangkan kalau ada laporan dari pihak lain terlihat kurang sigap atau bahkan slow respons," imbuh Habib Aboe.

Harus diingat, lanjutnya, bahwa setiap tindakan yang diambil oleh aparat akan selalu menjadi sorotan publik.

Habib Aboe menegaskan, tentu semua tidak ingin masyarakat melihat Polri seolah berat sebelah. Jika dulu pada kasus Ahmad Dani, laporan soal tindakan ujaran kebencian bisa diproses dengan cepat, tentunya pada kejadian saat ini hal serupa bisa dilakukan.

"Saya khawatir jika aparat

tidak bertindak sebagaimana mestinya, nanti ada yang mengambil langkah sendiri, mereka bisa melakukan tindakan eigen rechting atau perbuatan main hakim sendiri. Tentunya ini tidak boleh terjadi lebih baik polisi segera melakukan tindakan, apalagi banyak rekaman yang sudah beredar, sehingga cukup mudah mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dan siapa saja yang harus bertanggung jawab," tegas Bendahara Fraksi PKS DPR RI ini.





Setiap laporan masyarakat dari kelompok apapun harusnya ditangani dengan prosedur yang sama. Jangan tebang pilih. Itu salah satu makna menegakkan keadilan yang tertuang dalam Pancasila

Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.
Anggota Komisi VIII DPR RI



Seharusnya aparat bertindak sigap dengan kondisi saat ini, jangan sampai polisi terlihat cekatan ketika menerima laporan dari satu pihak. Sedangkan kalau ada laporan dari pihak lain terlihat kurang sigap atau bahkan slow respons

Habib Aboe Bakar Alhabsyi,
Anggota Komisi III DPR RI

Terkait Pembakaran
Foto Habib Riziq
dan Penusukan Ulama

Polisi Harus segera Bertindak

Meski Dorong Ekspor Sayur dan Buah ke Jepang, tapi Sayuran Asal China Masih Marak

Laporan para petani yang saya terima saat ini sayuran dari china seperti brokoli dan sawi telah marak di supermarket-supermarket. Mereka para petani mengeluh hasil panennya seperti brokoli di harga per Kilogram, Rp.1.500,- sampai dengan Rp.2.000,-. Padahal sebelum-sebelumnya, brokoli mampu berharga Rp. 21.000,- per Kg. Petani Sawi putih pun merasa sangat berat karena hasil panennya di harga Rp.1000,- per Kg

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (24/07) — Dampak Impor sayur-sayuran dari China yang melonjak yang mulai besar dari tahun 2019 hingga saat ini masih berdampak beredarnya sayuran impor di pasaran.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor sayur-sayuran sepanjang tahun 2019 meningkat dari tahun 2018, menjadi 770 juta dollar AS atau setara Rp 11,3 triliun (asumsi kurs Rp 14,700 per dollar AS).
"Laporan para petani yang

saya terima saat ini sayuran dari china seperti brokoli dan sawi telah marak di supermarket-supermarket. Mereka para petani mengeluh hasil panennya seperti brokoli di harga per Kilogram, Rp.1.500,- sampai dengan Rp.2.000,-. Padahal sebelum-sebelumnya, brokoli mampu berharga Rp. 21.000,- per Kg. Petani Sawi putih pun merasa sangat berat karena hasil panennya di harga Rp.1000,- per Kg", Urai Andi

Akmal Pasluddin, Anggota Komisi IV yang bermitra dengan Kementerian Pertanian.

Akmal mengatakan, saat ini pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mendorong peningkatan ekspor produk hortikultura, khususnya sayur dan buah-buahan Indonesia ke Jepang.

"Dorongan ini memang memiliki alasan kuat karena sudah berdasarkan riset dan observasi di negara tersebut akan potensi permintaan sayur dan buah yang mampu di suplai dari Indonesia", ungkap Akmal.

Politisi PKS ini berpendapat, seharusnya, negara Indonesia ini tidak perlu impor-impor lagi dari China karena Indonesia ini negara agraris.

"Indonesia sangat berpotensi besar memenuhi pasar buah dan sayuran Jepang, tapi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri malah mengandalkan negara lain", tuturnya.

Data yang dikumpulkan dari BPS mencatat adanya impor buah-buahan asal China meningkat 191,41% menjadi USD 47,5 juta selama pandemi covid-19 ini.

"Pada musim reses ini, kami komisi IV terjun ke lapangan



untuk cek para keluhan petani akan maraknya sayur impor ini. Karena ada sesuatu yang belum pas antara kebijakan dan kenyataan di lapangan. Di satu sisi pemerintah mendorong ekspor sayur buah, disisi lain ada keluhan petani akan harga sayuran produk dalam negeri jatuh akibat impor", tegas Akmal.

Akmal sangat setuju pemerintah membantu para petani lokal untuk mampu mewujudkan

ekspor sayur dan buah. Karena Indonesia telah menjadi pemasok sayuran dengan pangsa pasar sangat kecil di Jepang yakni 0,9%. padahal impor produk sayuran Jepang selama kuartal I 2020 mencapai USD 576 juta, sedangkan impor buah Jepang selama kuartal I 2020 mencapai USD 750,9 juta.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Syaikhu Soroti Naskah Akademik Omnibus Law Ciptaker yang Tak Berkualitas

Memang Pemerintah menjanjikan bahwa aturan yang dihapus ini akan dipindahkan ke dalam PP. Akan tetapi, akibat pelemahan ini justru dapat berakibat pada ketidakpastian berusaha bagi pengusaha. Sebab, aturan-aturan ini dapat saja sewaktu-waktu diubah kembali karena tidak memiliki kekuatan seperti dalam UU.

H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi V DPR RI

Bekasi (22/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikhu, menyoroti Naskah Akademik (NA) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Contohnya tentang aturan Bangunan Gedung. Menurut Anggota Komisi V DPR RI itu, UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung jadi salah satu yang akan direvisi dalam RUU Ciptaker. Ada sekitar 80% substansi yang akan diperbaiki dengan 60% diantaranya penghapusan materi muatan UU.

Alasan revisi tersebut karena banyaknya tumpang tindih aturan. Anaknya, Pemerintah tidak dapat membuktikan satu

ayat pun dari UU No. 28 Tahun 2002 ini yang tumpang tindih dengan UU lainnya. Selain itu Pemerintah tidak memberikan argumentasi yang cukup dalam Naskah Akademik (NA) karena hanya menyediakan penjelasan sebanyak 1,5 halaman.

"Ini aneh. Padahal dapat dibayangkan, sebuah UU yang separuh isinya dihapuskan sudah pasti kehilangan ruh pengaturannya," kata Syaikhu.

Politisi PKS ini melanjutkan, memang Pemerintah menjanjikan bahwa aturan yang dihapus ini akan dipindahkan ke dalam PP. Akan tetapi, akibat pelemahan ini justru dapat

berakibat pada ketidakpastian berusaha bagi pengusaha. Sebab, aturan-aturan ini dapat saja sewaktu-waktu diubah kembali karena tidak memiliki kekuatan seperti dalam UU.

"Kondisinya jadi semacam ada ketidakpastian bagi pengusaha. Bagaimana menarik investor?" tanya Syaikhu.

Mantan Wakil Walikota Bekasi itu juga mengkritisi dihapuskannya peran Pemerintah Daerah dalam membina wilayahnya melalui penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam revisi ini. Dalam RUU Ciptaker ini, IMB akan diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

"Mengapa dihapuskan kewenangan Pemda? Belum tentu pemerintah pusat mengerti kondisi wilayah yang ada di berbagai daerah, mengingat betapa luasnya wilayah Indonesia dan betapa khasnya permasalahan di setiap daerah," ujar Syaikhu.

Di sisi lain, ini mengurangi semangat otonomi daerah yang tercantum dalam Pasal 18, 18A, dan 18B UU 1945 Amandemen ke-2.

"Jadinya paradoks. Kita



ingin ada otonomi daerah, tapi kewenangan Pemda menerbitkan IMB dihapus," jelasnya.

Syaikhu juga menyoroti dihapuskannya materi muatan terkait persyaratan Bangunan Gedung. Dalam UU sebelumnya, terdapat berbagai aturan terkait keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Tapi di RUU Ciptaker dihapus yang dapat membahayakan pengguna gedung. Selain itu membuat Bangunan Gedung tidak lagi ramah bagi Penyandang Disabilitas dan lansia, apabila persyaratan-persyaratan

tersebut tidak wajib dipenuhi.

"Aturan keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan ini sudah standar. Dan wajib dipenuhi," tegas Syaikhu.

Karena itu, Syaikhu mendorong agar pembahasan ini dikembalikan ke komisi V yang secara khusus membidangi persoalan Bangunan Gedung. Tujuannya agar dapat membahas lebih dalam revisi UU tersebut dengan mengundang pakar khusus terkait UU yang direvisi.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Aturan Aneh Di Masa Reses



Diizinkan

di Tengah masa RESES



Panitia Kerja (Panja) DPR menggelar rapat mengenai **RUU Cipta Kerja di** Badan Legislasi (Baleg) di tengah masa reses, Rabu (22/7/2020).

Syahrul menilai seharusnya pemerintah dan DPR tetap fokus dalam menyelesaikan persoalan pandemi Covid-19 bukan malah membahas RUU Ciptaker di Masa Reses

Syahrul Aidi Maazat, Anggota Fraksi PKS DPR RI



Tidak Diizinkan

dengan alasan RESES

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan Polri, Kejaksaan, Kemenkumham atas **Kasus Djoko Tjandra**

Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja

Ketentuan dalam Pasal 1 Angka 13 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

Amin Ak Kritisi Kuota Impor Raw Sugar dan Kinerja BUMN Farmasi

“Setiap tahun devisa kita terkuras lebih dari US\$2 miliar atau sekitar Rp28 triliun untuk impor bahan baku obat. Padahal keanekaragaman hayati Indonesia sangat besar dan berlimpah, terbesar kedua di dunia setelah Brasil,”

AMIN AK, M.M.

Anggota Komisi VI DPR RI

Semarang (22/07) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mengkritisi kebijakan impor raw sugar dan kinerja BUMN farmasi saat kunjungan kerja ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI dan PT Phapros di Semarang, Rabu (22/7).

Di PTPN, Amin mendesak pemerintah memberikan kuota impor raw sugar untuk BUMN pemilik pabrik gula sesuai kapasitas pengolahan dari raw sugar menjadi gula kristal putih (GKP), atau biasa disebut proses rafinasi. Langkah tersebut sudah seharusnya dilakukan

Pemerintah sejak dulu.

Saat ini kapasitas pengolahan raw sugar menjadi GKP oleh BUMN mencapai sekitar 400 ribu ton per tahun atau 10% dari total impor raw sugar yang mencapai 4 juta ton per tahun. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, kebutuhan gula untuk industri dan rumah tangga mencapai 6 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 2 juta ton per tahun.

Amin juga mendesak pemerintah memberikan kepastian besaran kuota impor gula

untuk BUMN pemilik pabrik gula paling lambat di awal tahun. Hal itu untuk memberi kesempatan kepada BUMN bisa menyiapkan sarana proses rafinasi raw sugar menjadi GKP. Ia pun meminta Kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan membatu kesepakatan bersama terkait kepastian kuota itu.

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) VI dari Fraksi PKS itu, juga mengingatkan pentingnya revitalisasi pabrik gula secara menyeluruh. Mulai manajemen sampai sarana prasarana produksi. Menurutnya, pabrik dengan peralatan kuno tidak akan efisien. Diperlukan revitalisasi pabrik-pabrik gula.

Selain itu, Amin juga mendesak manajemen PTPN agar menjadikan petani mitra strategis dan mendorong mereka menjadikan komoditas tebu menjadi pilihan pertama mereka. Amin minta holding PTPN berupaya keras mencukupi kebutuhan gula dengan berbagai langkah strategis, baik yang terkait dengan produktifitas lahan (on



farm) hingga perbaikan sarana produksi (off farm). Pemberdayaan petani tebu penting agar bahan baku untuk pabrik gula bisa terpenuhi sekaligus mengurangi ketergantungan impor.

Sementara itu saat berkunjung PT Phapros, Wakil Rakyat asal Dapil Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) itu mempertanyakan penurunan kinerja PT Phapros usai bergabung ke dalam group Kimia Farma yang menjadi holding BUMN Farmasi. Alih-alih melipatgandakan pendapatan, laba PT Phapros tahun 2019 turun menjadi Rp102,31 miliar dibanding tahun 2018 yang mencapai Rp133,29 miliar atau turun sebesar 23,2%.

Amin juga menyoroti kinerja PT Kimia Farma (Persero), perusahaan induk

Phapros, yang kerjanya menurun signifikan. Mengutip laporan keuangan Kimia Farma yang disampaikan Direksi Kimia Farma saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (21/4/2020) lalu, posisi laba bersih perseroan (setelah pajak) pada 2018 sebesar Rp491,56 miliar berbalik menjadi rugi bersih Rp12,72 miliar pada 2019..

Amin juga menilai market share produsen obat pelat merah itu terbilang kecil bila dibandingkan perusahaan swasta. Saat ini total pangsa pasar industri farmasi nasional mencapai sekitar Rp88,36 triliun per tahun dan diperebutkan oleh 250-an perusahaan baik swasta maupun BUMN.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Aleg PKS Kritisi Pengelolaan Dana PEN yang Diberikan ke PT. Krakatau Steel

“Industri Baja kita ini harus terus dijaga, karena mempunyai dampak langsung dan efek multiplier, sektor baja menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan kita, mulai dari industri, transportasi, konstruksi dan fabrikasi

Drs. CHAIRUL ANWAR Apt.

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (25/07) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Chairul menyatakan bahwa dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diberikan kepada PT Krakatau Steel akan sia-sia, jika tidak diikuti oleh perbaikan regulasi untuk membenarkan impor dan perbaikan manajemen korporasi.

Hal itu disampaikan oleh Chairul menjelang hasil Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke PT Krakatau Steel di Cilegon, Banten, Selasa, (21/07/2020).

“Hasil kunjungan kami ke Cilegon kemarin dalam rangka

mengecek kesiapan PT Krakatau Steel sebagai salah satu penerima Dana PEN, kami berharap agar dana pinjaman yang diberikan pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan skema Mandatory Convertible Bond (MCB) kepada PT Krakatau Steel sebesar 3 Trilyun Rupiah benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh Manajemen PT Krakatau Steel serta harus didukung oleh perbaikan regulasi yang selama ini membuat industri baja dalam negeri terpuruk,” ungkap Chairul saat ditemui di Gedung DPP PKS

Jakarta, Jumat (24/07/2020).

Menurut Chairul pemerintah harus melakukan perbaikan regulasi untuk mendukung Industri Baja Nasional Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini kondisi Industri baja Indonesia sangat tidak kondusif oleh serbuan baja impor dari berbagai negara terutama Tiongkok.

Akibat maraknya baja impor tersebut, PT. Krakatau Steel menghentikan lini produksi wire rod pada akhir 2018 dan menurunkan produksi section and bar mill sampai 50%. Dampaknya, terjadi pengurangan tenaga kerja 3.500 orang.

“Menurut kami ada beberapa regulasi yang perlu diperbaiki untuk memulihkan Industri baja kita terutama Krakatau steel, regulasi yang perlu diperbaiki adalah penerapan pengadaan bea masuk anti dumping (BMAD) yang ada di PP 10/2012 dengan merevisi penjelasan pasal 14 di PP tersebut yang menjadi celah masuknya Baja Impor yang masuk di Wilayah



Batam dan memberlakukannya di seluruh Indonesia. Karena dampak dari masuknya baja Impor melalui Batam mengakibatkan utilisasi pabrik baja di Indonesia sangat rendah yang hanya mencapai sekitar 43% di tahun 2019,” jelas Politisi PKS asal Riau ini.

Selain perbaikan regulasi, menurut Chairul pembenahan manajemen di Krakatau Steel perlu dilakukan. Manajemen yang baru harus meningkatkan efisiensi dan menurunkan pemborosan yang selama ini terjadi.

“Langkah mismanagemen jangan terjadi lagi di Krakatau Steel, temuan BPK tahun 2015 dan 2016 tentang adanya pemborosan di proyek pabrik baja berteknologi tanur tiup jangan terulang kembali oleh

managemen yang sekarang. Dan sejatinya pada tahun 2016 Krakatau Steel juga sudah pernah menerima dana dari Negara berupa PMN sebesar Rp1,5 triliun tetapi tidak cukup membantu dan memanfaatkan dengan baik,” ungkap Chairul.

Menurut Chairul Industri baja di Indonesia merupakan Industri strategis yang mempunyai dampak langsung dan efek multiplier.

“Industri Baja kita ini harus terus dijaga, karena mempunyai dampak langsung dan efek multiplier, sektor baja menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan kita, mulai dari industri, transportasi, konstruksi dan fabrikasi.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Kunjungan Ke Kimia Farma

Pemerintah diminta Perkuat Industri Hulu Obat

NKRI harus berkejaran dengan waktu untuk ketahanan energi pangan dan obat dimana sekarang Indonesia masih impor Bahan Baku Obat 90-95 %. Bangladesh saja yang negara kecil dengan jumlah penduduk juga relatif kecil dibanding Indonesia, telah memiliki 21 pabrik Bahan Baku Obat (BBO)

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (21/07) — Ketahanan Energi, Pangan dan Obat saat ini menjadi strategis untuk disegerakan karena berkejaran dengan waktu, dimana bila salah strategi akan menimbulkan dampak berantai mulai dari krisis ekonomi, krisis politik hingga krisis kemanusiaan.

Hal ini dikatakan oleh anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, ketika kunjungan kerja dalam rangka reses masa persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020, (20/07/2020) Kemarin.

"NKRI harus berkejaran

dengan waktu untuk ketahanan energi pangan dan obat dimana sekarang Indonesia masih impor Bahan Baku Obat 90-95 %. Bangladesh saja yang negara kecil dengan jumlah penduduk juga relatif kecil dibanding Indonesia, telah memiliki 21 pabrik Bahan Baku Obat (BBO)", ujar Nevi.

Politisi PKS ini menjelaskan, dengan memperkuat industri hulu di bidang Obat-obatan, Negara Indonesia diharapkan mampu menurunkan 40% impor Bahan Baku Obat.

"Kementerian Perindustri-

an mesti memberikan kontribusi dalam mewujudkan pabrik-pabrik baru bahan baku obat sebagai bukti keberpihakan pemerintah kepada negara pada bidang kesehatan", ungkapnya.

Nevi melanjutkan, karena dengan mandiri dan daulatnya akan dunia kesehatan terutama obat-obatan, akan menghemat triliunan rupiah. Berdasarkan catatan yang ia terima, impor bidang farmasi kita pada 2017 tercatat mencapai 26.160 ton (US\$665,53 juta). Kemudian meningkat di 2018 dengan nilai 28.720 ton (US\$715,57 juta).

Politisi PKS ini menekankan bahwa, permasalahan obat di Indonesia bukan hanya pada kapasitas Indonesia untuk memproduksi bahan baku farmasi, akan tetapi kapasitas pengadaan bahan baku kimia atau biologis untuk proses sintesis dan juga purifikasi pada saat produksi bahan baku yang masih banyak yang bergantung pada impor.

"Angka ketergantungan impor bahan baku obat ini akibat tidak kuatnya industri kimia dasar di Indonesia. Kurangnya daya saing dan



tingginya biaya dalam pengembangan industri kimia dasar menjadi faktor penyebab," tandasnya.

Ia menambahkan, sejak bertahun-tahun, bahan farmasi Indonesia 90 persen masih impor dengan alasan tidak mudah untuk mengembangkan bahan baku obat. Butuh senyawa-senyawa kimia yang secara spek harus sintetis dan Spesifikasinya standar Obat.

"Kita terlalu terlena pada persoalan bahan baku obat ini. Bertahun-tahun perusahaan farmasi kita mendapatkan untung cukup besar seperti kimia farma mampu mendapat laba Rp 491,56 miliar Tahun 2018. Kini semua perusahaan mengalami anjlok laba perusa-

haan bahkan ada yang rugi baru sadar bahwa industri hulu obat-obatan sangat penting dalam mempertahankan industri farmasi kita", tukas Nevi.

Legislator Sumatera Barat II ini mempertegas kepada Kementerian Perindustrian, di hari-hari kedepan perlu serius berkontribusi BBO di hulu dan juga mengembangkan obat tradisional dimana Indonesia memiliki aneka ragam hayati sebagai negara tropis yang kaya akan Sumber Daya Alamnya. Kemandirian Bahan Baku Obat harus menjadi visi kedepan selain kemandirian pangan dan energi.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Wakil Ketua Fraksi PKS: Pemerintah Harus Hati-Hati Uji Klinis Vaksin dari China

Pemerintah wajib mengawasi secara ketat proses uji klinis ini secara objektif. Pemerintah harus menjamin bahwa uji klinis ini dilaksanakan oleh ahli yang berkompeten dan memiliki reputasi baik, berjalan secara transparans, akuntabel, sesuai dengan kaidah scientific dan efektif

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (24/07) — Rencana Pemerintah mendatangkan vaksin anti-corona dari China mendapat tanggapan luas dari masyarakat. Di media sosial marak disuarakan kekhawatiran atas keamanan vaksin yang akan diuji klinis awal Agustus ini.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Pemerintah berhati-hati melakukan berbagai tahapan uji klinis ini. Selain itu Pemerintah harus dapat meyakinkan masyarakat bahwa uji klinis

vaksin ini aman.

"Pemerintah harus mengawasi dengan serius uji klinis vaksin Covid-19 yang dikembangkan perusahaan Sinovac Biotech asal China, yang bekerja sama dengan BUMN Bio Farma. Harus dipelototi betul proses uji klinis vaksin ini," tegas Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini menganggap wajar jika masyarakat khawatir atas keamanan vaksin Covid-19 ini. Sebab masyarakat di negara

tempat vaksin ini diproduksi saja mendapat penolakan.

Kekhawatiran tersebut, kata Mulyanto, bisa jadi muncul karena Pemerintah kurang memberikan informasi yang tepat seputar vaksin yang akan diproduksi massal itu. Pada saat yang sama beredar berita kurang baik mengenai vaksin "made in China" tersebut. Tak heran jika kemudian masyarakat khawatir bahkan takut untuk terlibat dalam proses uji klinis tersebut.

"Meskipun kita sangat membutuhkan vaksin Corona tersebut, tetap saja kita perlu menerapkan azas kehati-hatian. Tetap harus proporsional, profesional dan rasional-obyektif," ujar mantan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi era Presiden SBY ini.

Mulyanto menambahkan Pemerintah wajib mengawasi secara ketat proses uji klinis ini secara objektif. Pemerintah harus menjamin bahwa uji klinis ini dilaksanakan oleh ahli yang berkompeten dan memiliki reputasi baik, berjalan secara



transparans, akuntabel, sesuai dengan kaidah scientific dan efektif.

"Jangan ada tipu-tipu ilmiah. Jangan sampai karena tekanan bisnis, obyektifitas riset dimanipulasi. Jangan sampai relawan yang menjadi obyek uji klinis ini sekedar menjadi "kelincin percobaan" bisnis vaksin yg tidak jelas perlingkungannya,"

kata Mulyanto.

Mulyanto juga minta Pemerintah lebih serius mendorong produksi vaksin Merah Putih yang tengah dikembangkan konsorsium LBM Eijkman dengan lembaga litbang nasional lainnya. Tujuannya agar Indonesia tidak tergantung pada vaksin impor dan menjadi pasar bisnis vaksin.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Memperingati
**HARI LAHIR
MAJELIS ULAMA
INDONESIA**

26 Juli 1975 - 26 Juli 2020

Mendukung kedudukan dan fungsi MUI untuk memperkokoh Ukhwah Umat Islam Indonesia baik di Ormas maupun Orpol, dalam Menghadirkan Islam yang Wasathiyah, Rahmatan lil-Alamin, mencintai dan menyelamatkan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Reses ke Unit Percetakan Qur'an,

Bukhori Minta Produksinya Ditingkatkan

“UPQ harus menjadi garda terdepan dalam memberantas buta huruf Alquran di Indonesia. Menjadi ironi sebenarnya jika melihat sebagian besar saudara kita masih belum bisa baca (red; Alquran) meskipun 87% penduduk Indonesia adalah muslim.

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Bogor (24/07) — Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf meminta produksi Alquran untuk kebutuhan nasional segera ditingkatkan.

Hal ini disampaikan secara langsung kepada Kepala Unit Percetakan Alquran (UPQ) Kementerian Agama, Jamaludin M. Marki, saat melakukan kunjungan ke Unit Percetakan Alquran (UPQ) Kemenag yang berlokasi di Ciawi, Kabupaten Bogor, Kamis (23/07/2020).

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan reses ketua kelompok komisi (poksi) PKS di Komisi VIII DPR tersebut yang turut mengawasi bidang keagamaan.

“Sejujurnya saya sedikit prihatin begitu mengetahui

produksi mushaf Alquran kita masih minim. Dengan melihat penduduk muslim di Indonesia yang berjumlah sekitar 225 juta, setidaknya dibutuhkan 4-5 juta eksemplar mushaf Alquran per tahun untuk mencukupi kebutuhan secara nasional. Sayangnya, UPQ saat ini baru mampu mencetak sekitar 1 juta mushaf Alquran per tahun,” tuturnya.

Lebih lanjut, Bukhori mengusulkan agar sarana dan prasarana UPQ perlu ditingkatkan seperti peremajaan mesin cetak dan perluasan lahan dalam rangka meningkatkan kapasitas penerbitan Al-Qur'an.

Berdasarkan data yang dihipunkan dari UPQ, unit pelaksana kerja di bawah Ditjen Bimas Islam ini telah memproduksi

Alqur'an sebanyak 1.080.543 eksemplar yang terdiri dari Al-Qur'an Terjemah, Mushaf Standar, Juz Amma, dan Yasin pada tahun 2019. Meskipun demikian, jumlah ini masih jauh dari target, yakni 5 juta per tahun.

Terdapat sejumlah faktor yang membuat jumlah penerbitan sampai saat ini masih terbatas, antara lain sarana dan prasarana UPQ belum memenuhi standar percetakan canggih, lahan yang terbatas, serta SDM yang memerlukan pembenahan dan pengembangan.

Pada tahun awal operasionalnya, jumlah distribusi mushaf Alquran dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang fluktuatif.

Sebagai catatan, pada tahun 2016 UPQ berhasil mendistribusi 35.000 eksemplar mushaf. Angka ini kemudian mengalami peningkatan signifikan sekitar 9 kali lipat pada tahun 2018 sehingga menyentuhkan angka 280.000 eksemplar. Namun, pada tahun 2019 angka tersebut justru mengalami penyusutan secara drastis sampai di angka 55.000 eksemplar.

Selain menyoroti produksi mushaf Al-Qur'an yang minim, Anggota Baleg Fraksi PKS ini juga mendorong agar UPQ menjadi leading sector dalam



upaya memberantas buta huruf Qur'an di Indonesia.

“UPQ harus menjadi garda terdepan dalam memberantas buta huruf Alquran di Indonesia. Menjadi ironi sebenarnya jika melihat sebagian besar saudara kita masih belum bisa baca (red; Alquran) meskipun 87% penduduk Indonesia adalah muslim. Sebab itu, UPQ harus melihat ini sebagai peluang amal dengan terus meningkatkan kapasitasnya dari berbagai aspek. Kami sangat mendukung untuk menuju arah tersebut” ujarnya.

Dalam rangka mengatasi

permasalahan tersebut, pada tahun 2016 Kemenag pernah mencanangkan program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Gemar Mengaji) untuk meningkatkan tingkat melek Alquran bagi masyarakat di seluruh provinsi serta kabupaten/ kota di Indonesia.

Kendati demikian, menurut hasil riset dari Institut Ilmu Alquran (IIQ) pada tahun 2018 masih tercatat sekitar 65% masyarakat Indonesia buta huruf Alquran. Angka statistik ini terbilang cukup tinggi mengingat 87,2% masyarakat Indonesia adalah muslim.

PKS: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ini Kerjanya Tidak Efektif

“BPJPH saja bisa konflik dengan MUI terkait sertifikasi halal. Hal seperti ini harusnya tidak terjadi. Karena itu, kami mempertanyakan profesionalitas BPJPH”

H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Anggota DPR RI Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis menyorot kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam mengurus sertifikasi halal produk-produk UMKM. Menurutnya, kinerja BPJPH tidak memuaskan. Banyak produk UMKM yang sulit mendapatkan sertifikasi halal, bahkan harus menunggu lama.

“Kerjanya sangat minim sekali. Ada UMKM yang memproduksi minyak rambut bicara ke saya. Mengurus sertifikasi halal saja sampai setahun. Padahal produknya sudah dinyatakan aman oleh BPOM” ujarnya.

Menurut Iskan, hal seperti ini tentu tidak kondusif untuk bisnis. Padahal, BPJPH memiliki

visi untuk menjadi lembaga yang kompeten dan menggubal. Namun ini tidak tercermin dalam kinerja mereka selama ini.

“BPJPH saja bisa konflik dengan MUI terkait sertifikasi halal. Hal seperti ini harusnya tidak terjadi. Karena itu, kami mempertanyakan profesionalitas BPJPH” ujar Iskan Qolba.

Tak heran, banyak kesempatan yang hilang akibat sulitnya mendapatkan sertifikasi halal. Sebagai contoh, Indonesia gagal meraup pasar produk halal di Eropa dibandingkan dengan negara lain, seperti Thailand, Singapura, dan Jepang.

“Di Eropa ada 50 juta muslim, permintaan mereka terhadap makanan halal sangat

tinggi. Kita ini kan negara muslim terbesar di dunia, harusnya produk kita menguasai pasar disana. Ini kok kalah sama Singapura, Thailand bahkan Jepang” kata Iskan Qolba.

Di sisi lain, Nadratuzza-man Hosen selaku Dirut Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halal Thoyyiban (LPH-KHT) PP Muhammadiyah, meminta agar DPR membantu menciptakan regulasi yang memudahkan pembinaan produk halal dan sertifikasi halal, khususnya di kalangan UMKM dan usaha ultramikro.

Hosen berpendapat bahwa ada tiga cara yang bisa dilakukan agar program pembinaan produk dan sertifikasi halal tersebut berhasil. “Kita harus menggandeng kampus, karena secara psikologis mereka diterima oleh rakyat kecil. Kedua, kita harus permudah administrasi, agar mereka tidak ketakutan dalam mengurusnya. Ketiga, gandeng asosiasi dan kelompok-kelompok usaha ultramikro agar mereka tidak merasa sendirian” ujar Hosen.



Tindakan Kriminal Kepada Imam Masjid dan HRS Harus Segera Ditindak Hukum

“Beberapa kali penganiayaan terhadap ulama atau ustadz, pelakunya selalu disebut mengalami gangguan jiwa. Sehingga tidak dikenakan sanksi hukum yang menjerakan. Sehingga tidak ada efek jeranya

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

Jakarta (29/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid prihatin dengan masih terjadinya tindakan kriminal dan persekusi kepada Imam Masjid dan Ulama, sebagaimana dialami Imam Masjid di Pekanbaru dan oknum-oknum pelaku ujaran kebencian serta pembakaran dan perobekan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq di depan Komplek Parlemen Indonesia.

Wakil Ketua MPR RI ini juga meminta Kepolisian Republik Indonesia, agar menegakan prinsip Indonesia sebagai Negara Hukum yang adil, dengan segera mengusut dan memproses

secara hukum para pelaku.

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa penusukan Imam Masjid di Pekanbaru sudah masuk ke dalam kategori penganiayaan yang terdapat dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun, anehnya ada upaya untuk kembali menyebutkan bahwa pelaku penusukan mengalami gangguan jiwa, seperti yang berulang kali terjadi sebelumnya. Menurutnya, hal tersebut yang mengakibatkan kasus serupa terulang lagi dan lagi.

“Beberapa kali penganiayaan terhadap ulama atau us-

tadz, pelakunya selalu disebut mengalami gangguan jiwa. Sehingga tidak dikenakan sanksi hukum yang menjerakan. Sehingga tidak ada efek jeranya. Agar memulihkan kepercayaan Umat dan masyarakat kepada kebenaran penegakan hukum di Indonesia, dan agar kasus persekusi seperti ini tak terulang lagi, seharusnya pihak kepolisian segera membuka data dan bukti secara transparan bahwa pelakunya memang benar-benar mengalami gangguan jiwa, atau hanya pura-pura saja, agar bisa dijerat dengan pasal yang memberatkan, sehingga menjadi warning supaya kasus serupa tak terulang lagi, kapanpun dan dimana pun,” ujar Anggota Komisi VIII ini melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (29/07).

Selanjutnya, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan untuk kasus ujaran kebencian dan upaya pembakaran dan perobekan baliho bergambar Habib Rizieq, pihak kepolisian juga harusnya menunjukkan kepada masyarakat bahwa



polisi bertindak profesional dan berlaku adil, karenanya Polisi mestinya menyatakan ke publik bahwa tindakan kriminal seperti itu dipastikan akan diusut secara adil.

Apalagi, beberapa pihak juga melaporkan ke pihak kepolisian terkait tindakan yang telah menghina dan menyebarkan kebencian terhadap Habib Rizieq sebagai ulama yang dihormati dan memiliki pengikut yang sangat banyak.

“Sebagai bentuk nyata adanya penegakan hukum yang adil, dan untuk memberikan kepercayaan kepada Umat atas tetap berlakunya penegakan hukum secara adil, yang dilakukan oleh Polisi, maka Polisi harusnya bergerak secara cepat, profesional dan adil, seperti saat menangani laporan terkait pembakaran bendera

PDIP beberapa waktu lalu atau ketika mengusut pelemparan bom molotov ke kantor PDIP di Bogor. Setiap laporan masyarakat dari kelompok apapun harusnya ditangani dengan prosedur yang sama. Jangan terbang pilih. Itu salah satu makna tertegakkan keadilan yang mengertung dalam Pancasila. Dan itu juga untuk menghentikan perasaan Umat yang merasa selalu diberlakukan tidak adil atau malah dianaktirikan oleh Negara, yang bisa berdampak sangat luas terkait pemaknaan dan pelaksanaan sila ke 3 dari Pancasila: Persatuan Indonesia. Suatu kondisi yang harus dihindari,” ujarnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Momentum Hari Anak Nasional Politisi PKS Soroti Permasalahan Anak saat Pandemi

Pendidikan Indonesia mendapat rapor merah, bahkan akhir tahun lalu skornya turun dalam laporan Programme for International Student Assessment (PISA). Ini harus menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah dengan Kementerian atau Lembaga terkait, terutama saat pandemi yang mengharuskan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)"

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (24/07) — Hari Anak Nasional tahun 2020 yang jatuh setiap 23 Juli sering dijadikan waktu untuk melakukan refleksi atas permasalahan anak Indonesia. Tahun ini, tema yang diangkat adalah "Anak Terlindungi, Indonesia Maju.

Dalam momentum Hari Anak Nasional, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetyani menyortir beberapa permasalahan anak Indonesia.

Pertama, masalah pendidikan. Menurut Netty mutu pendidikan anak Indonesia sangat rendah dan tertinggal dari negara-negara tetangga.

"Pendidikan Indonesia mendapat rapor merah, bahkan akhir tahun lalu skornya turun dalam laporan Programme for International Student Assessment (PISA). Ini harus menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah dengan Kemen-

terian atau Lembaga terkait, terutama saat pandemi yang mengharuskan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)" kata Netty dalam keterangan medianya, Kamis (23/07/2020).

"Harus bisa dipastikan bahwa PJJ tersebut harus bisa melahirkan SDM Indonesia yang berkarakter yakni beriman, bertakwa dan berakhlak mulia sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas tahun 2013. Tidak hanya itu, pendidikan kita saat ini juga masih mengalami disparitas kualitas layanan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta dan antar daerah di Indonesia" tambahnya.

"Di tengah keterbatasan akibat pandemi ini, saya mendorong pemerintah untuk tetap menjamin ketersediaan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan adil bagi semua anak-anak tak terkecuali anak berkebutuhan khusus dan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Apapun kondisinya, mereka adalah anak bangsa yang harus dijamin hak pendidikannya oleh negara" lanjut Netty.

Selain itu kata Wakil Ketua Fraksi PKS ini, masalah kesehatan anak masih terus membayangi anak Indonesia.

"Anak-anak Indonesia banyak terancam dalam masalah kesehatan, seperti gizi buruk. Mengang proporsi status gizi buruk dan gizi kurang secara nasional turun dari 19,6 persen pada 2013 menjadi 17,7 per-



sen pada 2019. Tetapi, di daerah seperti Papua Barat, Gorontalo, NTB dan NTT angkanya masih tinggi, yakni atas 20 persen. Angka stunting anak Indonesia juga masih tinggi yakni sekitar 30 persen, jauh di atas toleransi WHO 20 persen, padahal Presiden Jokowi meminta langsung agar penurunan stunting tetap menjadi prioritas nasional dan harus diwujudkan dalam berbagai program," papar Netty.

"Ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid-19, anak-anak Indonesia berpotensi tidak mendapatkan pangan yang cukup dan bergizi serta diperparah dengan tidak mendapatkan imunisasi karena posyandu tidak beroperasi dan kegiatan Tri Bina BKKBN mandek" tambahnya.

Ke khawatiran Netty ini

wajar, karena survei dari Kementerian Kesehatan dan UNICEF terhadap lebih dari 5.300 fasilitas kesehatan di Indonesia menunjukkan 84% responden mengatakan layanan imunisasi anak terganggu akibat Covid-19. Survei ini juga menunjukkan cakupan imunisasi dasar lengkap di Indonesia pada April 2020 menurun 4,7% dibanding April tahun lalu.

"Belum lagi kita bicara tingkat kekerasan anak yang tinggi, yang bahkan dari awal tahun hingga Juli 2020 sudah hampir mendekati empat ribu kasus yang dilaporkan. Pemerintah harus berani bertanggungjawab atas setiap permasalahan yang dihadapi anak-anak Indonesia, terutama sekali saat pandemi Covid-19 yang harus dicari jawaban dan solusinya" tandas Netty.

Angka Covid-19 dan Kematian Lampau China

Mufida: Strategi Pemerintah Perlu Dievaluasi

Tidak ada yang dibenturkan antara ekonomi dan kesehatan. Kita memahami semuanya harus berjalan. Dalam sistem penanganan bencana pun semua sudah diatur. Termasuk klaster-klaster yang mendukung misalnya pendidikan, sosial, ekonomi yang komando pusatnya ada di BNPB

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (29/07) — Angka Positif Covid-19 di Indonesia sudah menembus lebih dari 100 ribu kasus tepatnya 100.303 per Senin (27/7/2020). Angka kematian akibat positif Covid-19 juga melonjak di 4.838 jiwa.

Angka positif dan kematian akibat Covid-19 ini lebih tinggi dari China sebagai negara pertama tempat virus Covid-19 menyebar. Terbaru, Universitas Oxford memberikan nilai D terhadap kinerja Indonesia dalam penanganan Covid-19.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati prihatin dengan perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia

yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan strategi penanganan Covid-19 oleh pemerintah perlu dievaluasi.

Mufida menyebut Pemerintah lebih mengedepankan kepentingan ekonomi dibandingkan paradigma kesehatan dalam menangani Pandemi ini di Indonesia.

"Mulai dari Perppu penanganan Corona, kampanye new normal yang kemudian diakui salah oleh pemerintah dan terakhir pembentukan Komite Penanganan Covid-19 yang lebih berdimensi ekonomi dan menjadikan Satgas penanganan Covid-19 hanya

bagian subordinat saja dalam perumusan kebijakan," papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/07).

Mufida menyebut kebijakan yang menitikberatkan ekonomi dalam penanganan Covid-19 saat ini terbukti justru menjadikan perkantoran, pusat perdagangan dan pasar menjadi penyebaran klaster baru.

Berdasarkan data Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 per 25 Juli, di DKI Jakarta saja terdapat 68 cluster perkantoran dengan 440 kasus positif dan 107 cluster pasar rakyat dengan 547 kasus. Mufida juga prihatin dengan munculnya cluster di Fasilitas Kesehatan yang mencapai 124 cluster dengan 799 kasus yang menunjukkan keselamatan tenaga medis semakin terancam dengan pengendalian penularan yang kurang berjalan akibat pelanggaran yang dilakukan

"Jika terakhir Presiden meminta penanganan seimbang antara kesehatan dan ekonomi tapi tidak begitu yang terjadi di lapangan. Kampanye new normal presiden dengan mengunjung mal dan



menyerahkan kewenangan perpanjangan PSBB di masing-masing daerah membuat kebijakan nasional penanganan Covid-19 ini tidak seragam. Jika dulu episentrum di Jakarta, kini ada 8 propinsi penyumbang terbesar Covid-19 di Tanah Air," papar Doktor dari Universitas Indonesia ini.

Mufida meminta agar pemerintah tetap menggunakan pola strategi penanganan Covid-19 dengan pola pikir bencana kesehatan. Sehingga, seluruh kebijakan yang akan dikeluarkan menggunakan pertimbangan kebcanaan kesehatan.

"Tidak ada yang dibenturkan antara ekonomi dan kesehatan. Kita memahami semuanya harus berjalan. Dalam sistem penanganan bencana pun semua sudah diatur.

Termasuk klaster-klaster yang mendukung misalnya pendidikan, sosial, ekonomi yang komando pusatnya ada di BNPB," kata Anggota DPR RI dari Dapil Jakarta II ini.

Mufida meminta pemerintah segera memperbaiki catatan-catatan dalam strategi penanganan Covid-19 dan tetap memegang kendali penanganan Covid-19 hingga ke daerah.

"Jika pemerintah mengakui penggunaan new normal bermasalah maka semua dampak dari kebijakan itu harus dievaluasi menyeluruh. Pemerintah sudah diberikan kewenangan sangat besar untuk mengelola anggaran tapi juga terserap dengan baik. Sekalinya muncul program dengan dana besar justru menimbulkan polemik," katanya.

Kemendikbud Aneh! Tunjangan Guru Dipotong, Korporasi Malah Dapat Bantuan

Dalam lampiran Perpres 54/2020 yang terakhir direvisi menjadi Perpres 72/2020, tunjangan guru dipotong sebesar Rp. 3,3 triliun, setidaknya pada tiga komponen. Yakni, tunjangan profesi guru PNS Daerah, semula Rp 53,8 triliun menjadi Rp 50,8 triliun. Selain itu, tambahan penghasilan guru PNS daerah, semula Rp 698,3 miliar menjadi Rp 454,2 miliar. Kemudian tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus, semula Rp 2,06 triliun menjadi Rp 1,98 triliun. Sehingga totalnya mencapai Rp 3,3 triliun.

"Perpresnya sudah direvisi, tapi tunjangan guru tetap dipotong Rp. 3,3 triliun," Cetus Fikri

"Setelah kemarin marak guru yang protes tunjangannya disetop, sekarang anggaran gajah malah dikasih buat melatih guru, tapi melalui perusahaan besar, ini ironi

Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM
Wakil Ketua Komisi X DPR RI



Kemendikbud Aneh! Tunjangan Guru Dipotong, Korporasi Malah Dapat Bantuan

“Setelah kemarin marak guru yang protes tunjangannya disetop, sekarang anggaran gajah malah dikasih buat melatih guru, tapi melalui perusahaan besar, ini ironi

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Semarang (23/07) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menyelesaikan isu ketidakadilan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menyusul kisruhnya pemberian dana gajah sebesar Rp. 20 miliar kepada organisasi CSR (Corporate Social Responsibility/ tanggung jawab perusahaan) milik Tanoto Foundation dan Samporna untuk pelatihan guru.

“Setelah kemarin marak guru yang protes tunjangannya disetop, sekarang anggaran gajah malah dikasih buat melatih guru, tapi melalui perusahaan besar, ini ironi,” kritiknya di sela reses, Kamis (23/07).

Fikri melihat kekisruhan ini akan memicu protes para guru lebih besar lagi karena dianggap mengusik rasa keadilan dan nurani publik.

“Belum selesai masalah pemotongan anggaran tunjangan profesi guru di daerah, kemudian kemarin penghapusan anggaran guru di satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), tapi malah anggaran pelatihan guru dialihkan untuk perusahaan besar,” keluh politisi PKS ini.

Menurut dia, keresahan masyarakat soal nasib dan kesejahteraan guru belakangan ini seharusnya direspon dengan lebih bijak oleh pemerintah pusat, bukannya malah terus menambah kontroversi baru.

“Karena alasan Pandemi, efisiensi anggaran Rp. 3,3 triliun diarahkan untuk memanggkas tunjangan guru, tetapi kita lihat isu kartu pra-kerja Rp. 5,4 triliun buat siapa, lalu ada isu pelatihan guru dikasih ke perusahaan juga,” kata Fikri menyinggung kisruh-kisruh

sebelumnya.

Dalam lampiran Perpres 54/2020 yang terakhir direvisi menjadi Perpres 72/2020, tunjangan guru dipotong sebesar Rp. 3,3 triliun, setidaknya pada tiga komponen. Yakni, tunjangan profesi guru PNS Daerah, semula Rp 53,8 triliun menjadi Rp 50,8 triliun. Selain itu, tambahan penghasilan guru PNS daerah, semula Rp 698,3 miliar menjadi Rp 454,2 miliar. Kemudian tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus, semula Rp 2,06 triliun menjadi Rp 1,98 triliun. Sehingga totalnya mencapai Rp 3,3 triliun.

“Perpresnya sudah direvisi, tapi tunjangan guru tetap dipotong Rp. 3,3 triliun,” Cetus Fikri.

Soal dana pelatihan guru dan kepala sekolah itu merupakan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim itu menganggarkan hingga Rp 595 miliar untuk program Organisasi Penggerak. Sejauh ini jumlah peserta yang lolos seleksi evaluasi ada 183 organisasi.

Pelatihan ini ditargetkan untuk menunjang kemampuan literasi dan numerasi guru serta kepala sekolah. Literasi dan



numerasi adalah salah dua aspek yang ditekankan dalam asesmen kompetensi dan survei karakter yang menjadi pengganti ujian nasional (UN).

Ada 3 kategori lembaga penerima hibah untuk melakukan kegiatan pelatihan tersebut, yakni Gajah, Macan, dan Kijang. Untuk Gajah dialokasikan anggaran sebesar maksimal Rp20 miliar per tahun, Macan Rp5 miliar per tahun, dan Kijang Rp1 miliar per tahun.

Fikri juga menyatakan tdk pantas dana APBN diberikan kepada CSR perusahaan besar yang sudah berlimpah dana.

“Mereka melaksanakan

kewajiban Undang-undang, yakni menyisihkan pendapatan untuk tanggung jawab sosial, artinya memberi, bukan malah dibayar, jangan jadi akal-akalan,” kritiknya.

Selain itu, ia mendesak agar hasil evaluasi penilaian dalam program Organisasi Penggerak ditarik kembali.

“Kisruh ini sudah melukai banyak elemen masyarakat, NU & Muhammadiyah, dua ormas terbesar di negeri ini sudah mundur dari penerima program, kalau diteruskan saya tidak jamin akan terus jadi bola salju yang membesar ke isu lain,” tegasnya.

Aleg PKS Soroti Gaduhnya Program Organisasi Penggerak & Mutu Pendidikan Nasional

Sampai saat ini, kita masih belum beranjak dari keadaan dan kondisi Mutu Pendidikan Nasional yang masih jauh dari harapan. Sudah berkali ganti Presiden dan Menteri, sudah berpuluh tahun dan berbilang kebijakan pendidikan nasional, nyatanya permasalahan pendidikan nasional kita masih banyak 'pekerjaan rumah'.

Dr. H. FAHMY ALAYDROES, MM, M.Ed

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (26/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Fahmy Alaydroes menanggapi peluncuran Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud RI pada 10 Maret 2020 lalu.

Program ini, menurut Fahmy, niat dan intensinya baik, yakni berupaya untuk mempercepat perbaikan mutu sekolah-sekolah di seluruh Indonesia Program OPP.

"Program fokus kepada upaya peningkatan kualitas guru dan Kepala Sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil

belajar siswa, terutama dalam hal peningkatan kemampuan numerasi, literasi, dan karakter," tutur Fahmy.

Pelaksanaan ini, lanjutnya, dilakukan dengan melibatkan sejumlah Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, terutama organisasi-organisasi yang sudah memiliki rekam jejak yang baik dalam implementasi program pelatihan guru dan kepala sekolah, dengan tujuan meningkatnya kemampuan profesional para pendidik dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa.

"Nantinya, melalui fasilitas

yang disediakan pemerintah, baik pendanaan maupun konsep dan konten pembinaan disediakan pemerintah, sehingga terjadi pergerakan massif peningkatan mutu pembelajaran ke seluruh sekolah di berbagai wilayah dan daerah di Indonesia," papar Anggota DPR RI Komisi X ini.

Fahmy menambahkan, Kemendikbud mengalokasikan dana sebesar Rp 595 miliar untuk program tersebut. Anggaran tersebut diberikan kepada yayasan, lembaga pendidikan ataupun ormas yang direkrut oleh Kemendikbud dengan sejumlah persyaratan.

"Lembaga Pendidikan atau ormas yang direkrut dijadikan mitra untuk membantu melaksanakan program Besar anggaran yang diberikan kepada mitra penggerak dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan banyak sasaran satuan pendidikan, yakni kategori satu (Gajah) dengan sasaran lebih dari 100 satuan pendidikan, akan memperoleh bantuan maksimal Rp20 miliar per tahun, kategori dua (Macan) dengan sasaran 21-100 satuan pendidikan, dapat bantuan maksimal Rp5 miliar per tahun dan kategori



tiga (Kijang) dengan sasaran 5-20 satuan pendidikan, dapat bantuan maksimal Rp 1 miliar per tahun", terang Fahmy.

Kiwaru, kata Fahmy, program ini menjadi ramai karena tiga ormas besar yang terlibat, NU, Muhammadiyah dan PGRI menarik diri (mundur) dari keterlibatannya dengan program ini dengan alasan antara lain kriteria pemilihan ormas dan Lembaga Pendidikan yang ditetapkan

lolos evaluasi proposal sangat tidak jelas dan tidak transparan.

"Menurut mereka, ada lembaga yang levelnya hanya bimbingan belajar, paguyuban dan forum yang lolos verifikasi untuk menerima bantuan dana Gajah, Rp. 20 Milyar per tahun," pungkasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Sanksi Pidana Dihapus

Sekretaris Fraksi PKS Khawatirkan Ijazah Palsu

“Kita patut khawatir, dengan adanya penghapusan pasal sanksi pidana ini, praktek jual beli ijazah, jual beli gelar, penggunaan ijazah palsu dan penyelenggaraan kampus ilegal akan semakin marak. Apalagi tak lama lagi kita akan memasuki masa pilkada, lalu kemudian masa pileg. Beberapa kali kita telah berhadapan dengan kasus ijazah palsu atau ilegal. Karenanya menjadi rawan terulang temuan-temuan kasus seperti ini,

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (22/07) — Masuknya Undang-undang terkait pendidikan ke dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja kembali dikritisi. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menyampaikan kekhawatirannya terkait dihapuskannya pasal terkait sanksi pidana dari Undang-undang no 20 tahun 2003 di dalam RUU Cipta Kerja. “Beberapa pasal dari UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003

yang dihapus di dalam RUU Cipta Kerja adalah pasal 67-69 yang terkait sanksi pidana. Padahal pasal 2 RUU Cipta Kerja sendiri menjelaskan bahwa asas RUU ini salah satunya adalah kepastian hukum. Tetapi penghapusan pasal-pasal terkait sanksi pidana dari UU Sisdiknas, justru telah memunculkan ketidakpastian hukum,” kata Ledia Hanifa. Pasal 67-69 dari UU

Sisdiknas yang dihapus dalam RUU Cipta Kerja itu meliputi sanksi pidana bagi lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak, memberikan sebutan guru besar atau profesor tanpa kesesuaian ketentuan, lembaga pendidikan yang berjalan ilegal hingga perseorangan yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi serta gelar tanpa memenuhi ketentuan persyaratan.

“Kita patut khawatir, dengan adanya penghapusan pasal sanksi pidana ini, praktek jual beli ijazah, jual beli gelar, penggunaan ijazah palsu dan penyelenggaraan kampus ilegal akan semakin marak. Apalagi tak lama lagi kita akan memasuki masa pilkada, lalu kemudian masa pileg. Beberapa kali kita telah berhadapan dengan kasus ijazah palsu atau ilegal. Karenanya menjadi rawan terulang temuan-temuan kasus seperti ini,” ungkap Ledia Hanifa.

Kepemilikan ijazah, serti-



fikat dan gelar akademik memang menjadi salah satu syarat dalam kontestasi calon kepala daerah, juga calon anggota legislatif. Selain itu, juga menjadi syarat dalam penerimaan kepegawaian baik Pegawai Negeri, BUMN maupun swasta.

Meski praktek-praktek bodong semacam ini bisa jadi tidak bisa sepenuhnya hilang, namun Ledia meyakini adanya sanksi pidana telah memberikan kepastian hukum pada masyarakat bahwa hal tersebut bertolak dan melanggar hukum.

“Kepastian hukum terkait pelanggaran dalam soal pemberian maupun penggunaan ijazah, sertifikat akademik serta gelar ilegal juga berguna untuk meningkatkan kualitas SDM bangsa kita yang tengah diusung menuju SDM Unggul berkarakter Pancasila. Karenanya menjadi tidak masuk akal pasal terkait sanksi pidana ini justru yang dibidik oleh pemerintah untuk dihapuskan,” tutup Ledia menyimpulkan.

Sakinah Aljufri: Mayoritas Anggota Komisi X Minta POP Kemendikbud Harus Ditunda

“Baru beberapa hari lalu, kita minta untuk rapat darurat, mesti dilakukan dengan virtual. Tapi oleh Sekjen sampaikan, saat ini belum bisa karena masih dalam reses. Tetapi dinamikanya saat ini, mayoritas anggota Komisi X minta agar program ini ditunda dulu, sambil dilakukan evaluasi”

Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

Anggota Komisi X DPR RI

Palu (27/07) — Setelah Muhammadiyah, NU dan yang terbaru Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), menyatakan menarik diri dari Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), mayoritas anggota di Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, meminta agar program tersebut ditunda dulu, untuk dilakukan evaluasi kembali.

Penegasan ini,

disampaikan Anggota Komisi X yang juga Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI Sakinah Aljufri, saat temu konstituen sekaligus reses di Kota Palu, Sabtu (25/07/2020) malam.

“Baru beberapa hari lalu, kita minta untuk rapat darurat, mesti dilakukan dengan virtual. Tapi oleh Sekjen sampaikan, saat ini belum bisa karena masih dalam reses. Tetapi dinamikanya saat ini, mayoritas anggota Komisi X minta agar program ini ditunda dulu,

sambil dilakukan evaluasi,” tegas Sakinah.

Persoalan soal POP ini mengemuka saat reses Sakinah, setelah Munawarah, salah satu warga yang hadir dalam temu konstituen tersebut, mempertanyakan sikap komisi X DPR RI terkait POP, yang saat ini mendapat penolakan dari beberapa elemen masyarakat. Muhammadiyah dan NU dan yang terbaru PGRI, telah menyatakan menarik diri dan tidak ikut terlibat dalam POP tersebut.

Soal keterlibatan dua lembaga yakni Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation, di Organisasi Penggerak untuk kategori gajah, menurut Sakinah, hal itu tidak pernah dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Komisi X yang membidangi pendidikan.

Walaupun katanya, dalam hal seleksi dan rekrutmen organisasi yang diajak terlibat dalam program POP tersebut, secara teknis berada di



Kementerian Pendidikan, namun DPR-RI, khususnya Komisi X harus dilibatkan, sebagai mitra kerja Kemendikbud.

Menurut Sakinah, setelah masa reses selesai, komisinya akan langsung melakukan rapat dengan pihak Kemendikbud, agendanya mengevaluasi

kembali program POP.

“Termasuk yang akan disampaikan dan dipertanyakan, soal keterlibatan Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation, di Organisasi Penggerak untuk kategori gajah,” tutup Sakinah

KUTIPAN MEDIA

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



kumparan.com

Berita, Juli 2020 5:37



Anggota DPR Minta Sri Mulyani Segera Cairkan Gaji ke-13 PNS

Anggota Komisi XI DPR RI, Hidayatullah, minta pemerintah dapat segera mencairkan gaji ke-13 bagi PNS atau pegawai negeri sipil. Hal ini dinilai sebagai salah satu upaya untuk menggairahkan aktivitas perekonomian nasional.

"Gaji ke-13 meski hanya untuk PNS, mampu mendorong daya beli dan konsumsi rumah tangga," kata Hidayatullah dalam keterangan tertulis, Senin (20/7).

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan, apa pun yang bisa mendorong daya beli dan konsumsi harus segera digerakkan. Apalagi menurut Hidayatullah, konsumsi rumah tangga berkontribusi sangat besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

www.cnnindonesia.com

Selasa, 21/07/2020 13:12 WIB

Sri Mulyani Pastikan Gaji ke-13 PNS Cair Agustus 2020



Jakarta, CNN Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemberian gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri akan cair Agustus mendatang. Gaji ke-13 ini akan masuk dalam program stimulus perekonomian di masa pandemi virus corona.

"Pembayaran gaji ke-13 direncanakan dilakukan pada Agustus 2020, dan untuk pelaksanaan ini kami akan segera mengeluarkan revisi dari regulasi yang ada," ujarnya, Selasa (21/7).



Fraksi PKS DPR RI



fraksipksdprri



@fripsdprri



fraksi.pks.id

Perlu Mitigasi Serius atas Ketimpangan Ekonomi yang Mengkhawatirkan

“Kita melihat data baik di kota maupun di desa melonjak. Dan ini baru awal dampak pandemi. Kita sangat khawatir angka ketimpangan ekonomi akan berpotensi semakin melebar setelah dampak pandemi meluas yang terjadi setelah Maret 2020. Ini harus menjadi warning serius, dan harus ada mitigasi yang serius”

H. ECKY AWAL MUCHARAM

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (21/07) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, mendesak pemerintah untuk melakukan mitigasi atas melebarnya kesenjangan ekonomi yang akan semakin memburuk akibat resesi ekonomi.

“Selain jumlah rakyat miskin yang meningkat 1,63 juta orang berdasarkan data BPS, yang sangat mengkhawatirkan adalah meningkatnya kesenjangan atau ketimpangan ekonomi. Kondisi ini berpotensi sema-

kin memburuk ketika resesi ekonomi semakin dalam dan tidak dimitigasi dengan baik. Kita sangat khawatir dengan hal ini”, tegasnya menanggapi perkembangan data BPS baru.

Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan bahwa tidak hanya tingkat kemiskinan yang naik karena Pandemi Covid-19 tetapi gini ratio atau tingkat ketimpangan masyarakat di Indonesia pun semakin tinggi.

BPS telah mengumumkan gini ratio secara nasional pada Maret 2020 sebesar 0,381 poin atau naik dari posisi September 2020 sebesar 0,380 poin. Lebih detail, gini ratio di perkotaan naik dari 0,391 poin menjadi 0,393 poin dan di perdesaan naik dari 0,315 menjadi 0,317.

“Kita melihat data baik di kota maupun di desa melonjak. Dan ini baru awal dampak pandemi. Kita sangat khawatir angka ketimpangan ekonomi akan berpotensi semakin melebar setelah dampak pandemi meluas yang terjadi setelah Maret 2020. Ini harus menjadi warning serius, dan harus ada mitigasi yang serius”, imbuhnya.

Ecky juga menekankan bahwa dampak berat dari pandemi ini telah memukul rakyat menengah bawah sehingga kebijakan dan program harus berpihak untuk mereka.

Ecky memberi catatan atas hasil survei BPS, dimana sebanyak 7 dari 10 orang masyarakat berpendapatan rendah atau pendapatan kurang dari Rp 1,8 juta per



bulan mengalami penurunan pendapatan. Demikian juga yang berpendapatan di atas Rp 7,2 juta per bulan, sebanyak 3 dari 10 orang mengaku mengalami hal yang sama.

“Terlihat jelas, pandemi telah menghantam seluruh lapisan masyarakat. Namun, yang lebih berdampak sangat berat adalah rakyat lapisan bawah dan menengah. Untuk itu kebijakan dan program jaring pengaman sosial dan bantuan sosial harus tepat waktu dan tepat sasaran untuk mereka. Jangan terlambat”, tandas Anggota DPR RI Asal Jawa Barat ini.

Secara keseluruhan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan ini mengkhawatirkan target-target pengurangan kesenjangan akan gagal kembali dicapai. Dimana

target pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 untuk gini rasio yaitu pada tahun 2019 mencapai angka 0,36 telah gagal dicapai. Selanjutnya angka RPJMN 2020-2024 untuk rasio gini adalah 0,37-0,374.

“Dan DPR bersama pemerintah telah menyepakati untuk penyusunan target dalam RAPBN 2021 indeks rasio gini adalah 0,377 – 0,379. Ini harus menjadi perhatian bersama. Bahwa pengurangan kesenjangan adalah esensial untuk mewujudkan mandat Konstitusi dan Pancasila, merealisasikan keadilan sosial. Sehingga semua anak bangsa ini merasa hidup dalam negara yang berpihak pada nilai-nilai keadilan dan kebaikan hidup bersama”, tambah Ecky.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Terancam Resesi

Aleg PKS Desak Pemerintah Antisipasi Gelombang PHK dan Kemiskinan

Peranan pemerintah penting bukan saja memperjelas arah kebijakan, namun mendorong tindakan nyata yang relevan termasuk meminimalisir ancaman terhadap lonjakan PHK dan kemiskinan”

Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (25/07) — Perekonomian di dunia termasuk Indonesia melemah akibat pandemi covid-19. Pelemahan ini membuat beberapa pengamat ekonomi memprediksi Indonesia berada dijurang resesi pada kuartal III.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Junaidi Auly meminta

kepada Pemerintah untuk lebih responsif dalam mengantisipasi adanya ancaman resesi. Pemerintah sebisa mungkin mendorong pertumbuhan di sektor UMKM dan menjaga konsumsi rumah tangga.

“Peranan pemerintah penting bukan saja memperjelas arah kebijakan, namun mendorong tindakan nyata yang relevan termasuk meminimalisir

ancaman terhadap lonjakan PHK dan kemiskinan” ujar Junaidi dalam keterangan tertulisnya. Sabtu, (25/07)

Anggota Komisi XI DPR ini melanjutkan, saat ini imbas dari lemahnya aktivitas perekonomian dalam negeri tidak sedikit masyarakat yang dirumahkan bahkan di PHK, mereka penting untuk difasilitasi dan pemerintah harus hadir.

Perlu diketahui, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2020 sebesar 2,97 persen, pertumbuhan tersebut mengalami kontraksi 2,41 persen dibandingkan triwulan IV 2019, kuartal I-2020 ini juga lebih rendah dari kuartal I-2019 yang 5,07 persen

(yoy). Sedangkan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2020 minus 3,8 persen. BPS juga merilis persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen meningkat 0,56 persen terhadap September 2019, jadi jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019.

Legislator PKS asal Lampung ini mengatakan, pemerintah harus melakukan langkah yang signifikan sehingga benar-benar berimplikasi pada perekonomian.

“Keberpihakan pemerintah pada efektivitas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) penting untuk dijadikan perhatian khususnya pada kecermatan dan pemerataan”, tutup Junaidi mengakhiri.



Politisi PKS Nilai Pembentukan Tim Pemulihan Ekonomi Nasional belum Urgen

“Pembentukan tim ini rasanya belum urgen. Untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, pemerintah bisa mengoptimalkan kementerian dan lembaga yang sudah ada,

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (22/07) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati angkat bicara menanggapi dibentuknya Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang baru saja di bentuk presiden Jokowi.

“Pembentukan tim ini rasanya belum urgen. Untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, pemerintah bisa mengoptimalkan kementerian dan lembaga yang sudah ada,” kata Anis di Jakarta (20/07/2020).

Menurut Anis, jika tim yang ada dinilai kurang optimal dalam melakukan tugasnya, solusinya dipacu dan

ditingkatkan kinerjanya bukan dibentuk tim baru.

“Permasalahan yang ada bukan pada kurangnya jumlah tim, akan tetapi peningkatan kinerja agar tim bisa bekerja sesuai harapan,” ungkapnya.

Untuk penanganan Covid-19, Anis mengatakan Kementerian Kesehatan harus dipacu kinerjanya selain sudah dibentuk juga gugus tugas penanganan Covid-19.

Untuk pemulihan ekonomi, lanjut Anis, Kemenko Perekonomian bisa lebih difungsikan dan gugus tugas pemulihan ekonomi juga sudah dibentuk.

“Jangan sampai pembentukan tim baru ini menjadi jang-

gal. Disatu sisi ingin membubarkan 18 lembaga, tapi kemudian dibentuk tim baru,”pungkasnya.

Anis menegaskan bahwa pada saat ini, rakyat membutuhkan pemerintah yang sigap. Ia berharap pemerintah lebih focus pada aksi nyata yang berdampak signifikan bagi rakyat dari pada membentuk tim dengan melibatkan sejumlah Menteri yang sesungguhnya mereka sudah memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri yang harus dilakukan dengan optimal.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah sebelumnya diberitakan membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk menyelesaikan persoalan dampak pandemi terhadap perekonomian dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 yang diteken Presiden Jokowi.

Tim itu terdiri atas Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional serta satuan yang sudah ada saat ini, yakni Satuan Tugas Penanganan Covid-19.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



SELAMAT HARI BHAKTI ADHYAKSA KE 60

Semoga Kejaksaan Agung Terus
bergerak dan berkarya, selalu
memberikan pelayanan terbaik
bagi masyarakat

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

Legislator PKS: RUU BPIP Buka Jalan Politisasi Lembaga Riset dan Inovasi

Sebagai mantan peneliti Mulyanto dapat merasakan kegelisahan para pihak terkait keberadaan ketentuan ini. Meskipun baru sebatas tahap rancangan tapi keberadaan ketentuan ini bisa mengganggu fokus kerja riset dan inovasi bangsa. Dengan ketentuan ini, sangat mungkin arah kebijakan riset dan inovasi menjadi politis.

Jakarta (24/07) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS menilai aneh beberapa ketentuan dalam RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP). Salah satunya tentang kewenangan Ketua Dewan Pengarah BPIP yang dapat menunjuk pejabat ex-officio Ketua Dewan Pengarah badan dan lembaga yang menyelenggarakan riset dan inovasi nasional.

Dalam Pasal 10 ayat 1, RUU BPIP disebutkan "Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, ayat 2 dapat

menunjuk ketua atau salah satu anggota untuk menjabat ex officio sebagai ketua dewan pengarah di kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan inovasi".

Menurut Mulyanto isi ketentuan ini sangat bahaya karena secara tidak langsung memberi jalan kepada seseorang untuk mengatur berbagai hal yang di luar kewenangannya. Dengan ketentuan ini badan dan lembaga riset dan inovasi sangat mudah dipolitisasi.

"Secara kelembagaan terlalu memaksakan diri kalau Ketua Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio harus menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)," kata Mulyanto.

"Kalau dicari-cari mungkin saja ada hubungan antara haluan ideologi Pancasila dengan riset dan inovasi, namun hubungan itu terlalu mengada-ada," lanjut pemegang gelar doktor teknologi nuklir lulusan Tokyo Institute of Technology ini.

Sebagai mantan peneliti Mulyanto dapat merasakan kegelisahan para pihak terkait keberadaan ketentuan ini. Meskipun baru sebatas tahap rancangan tapi keberadaan ketentuan ini bisa mengganggu fokus kerja riset dan inovasi bangsa.

Dengan ketentuan ini, sangat mungkin arah kebijakan riset dan inovasi menjadi politis.

"Para peneliti IPTEK banyak yang bertanya, apakah karena terkait soal ini Perpres kelembagaan BRIN, sejak kabinet Jokowi Jilid II terbentuk, sampai hari ini belum terbit,"



imbuh Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.

Mulyanto menambahkan ketentuan ini mencerminkan Pemerintah tidak serius mengembangkan inovasi nasional, baik dari aspek pendanaan maupun kelembagaannya.

Padahal kepada masyarakat Pemerintah selalu mengatakan akan mengembangkan

inovasi sebagai sumber daya saing dan engine of growth bagi ekonomi nasional.

"Pemerintah semestinya segera membentuk BRIN ini, agar roda pembangunan riset dan inovasi nasional berputar cepat, bukan malah melantarkannya," desak Mulyanto.



Dr. Mulyanto

Anggota Fraksi PKS DPR RI



Emoh hadir, sebab :

- . DPR bukan SOPIR angkot kejar setoran.
- . Bukan juga STEMPEL eksekutif.
- . Ini reses saat pandemi, kita harus turun meringankan beban rakyat.

www.ngelmu.co

**DPR Tetap Bahas Omnibus Law di Masa Reses,
PKS Tolak Hadir**

Bantu UMKM Bangkit, Rofik Gandeng Para Pengusaha Nasional

“Hari ini, Kami mengundang para pengusaha nasional untuk bertemu langsung dengan para pelaku UMKM Purbalingga, nantinya mereka akan membantu memasarkan produk UMKM terpilih di Outlet Snack Corner yang tersebar di seluruh Indonesia, Khususnya di Jawa.

H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Komisi VII DPR RI

Purbalingga (22/07) — Pandemi Virus Corona berdampak pada semua sektor kehidupan, khususnya perekonomian. Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pun ikut terkena dampak.

Prihatin dengan kondisi ini, Rofik Hananto, Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jawa Tengah VII ini terus mencari terobosan agar para pelaku UMKM bisa terus eksis dan tumbuh di tengah kondisi ini.

Rofik mengadakan acara bertajuk Beauty Contest Produk UMKM dengan mengundang para pelaku UMKM terpilih dan para pengusaha nasional di hotel braing Purbalingga,

(21/07)

Pada sambutannya, Rofik mengatakan akan membantu memasarkan produk-produk UMKM ini ke pasar nasional.

“Hari ini, Kami mengundang para pengusaha nasional untuk bertemu langsung dengan para pelaku UMKM Purbalingga, nantinya mereka akan membantu memasarkan produk UMKM terpilih di Outlet Snack Corner yang tersebar di seluruh Indonesia, Khususnya di Jawa.” Kata Rofik

“Karena produk-produk tersebut akan dipasarkan secara nasional, produk-produk yang terpilih nantinya akan

di bantu untuk dipacking secara customes tanpa merubah ciri khas produk itu sendiri.”

Imbuhnya

“Sudah saatnya UMKM naik kelas, dan ini bisa terwujud apabila kita berkolaborasi dengan komunitas dan jaringan yang ada,” pesan Rofik menambahkan.

Disaat pandemi dan setelah pandemi virus corona, produk-produk yang paling dicari masyarakat adalah produk yang sehat.

Untuk itu salah satu syarat produk UMKM agar terpilih adalah produk tidak mengandung bahan 5 P.

“Salah satu syarat produk yang akan dipasarkan adalah produk tersebut tidak mengandung 5P (Penyedap, Pemanis, pengawet, pewarna, pengental), natural, alami dan sehat,” tegas Rofik.

Dimas, Kordinator UMKM Purbalingga mengucapkan terimakasih dengan diadakannya acara ini.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada pak Rofik yang telah mengadakan acara beauty contest bagi para pelaku UMKM Purbalingga ini, dan hari ini kami membawa produk-



produk UMKM terpilih untuk dipresentasikan.” Kata Dimas

Direktur SEMAR Business School yang juga seorang mompreneur, Fidhoh Threeeyati menyambut baik acara beauty contest bagi pelaku UMKM ini.

“Acara Beauty Contest untuk para pelaku UMKM ini bagus sekali karena mempertemukan para pelaku UMKM dengan para pelaku bisnis yang memiliki jaringan di seluruh Indonesia, bahkan

sudah merambah ke beberapa negara.” Kata Fidhoh

“UMKM dari dulu sudah membuktikan, ditengah krisis dimana banyak perusahaan gulung tikar / kolaps, UMKM justru tetap eksis dan bangkit.” Imbuhnya

Fidhoh berharap dengan acara ini apalagi didukung oleh Pak Rofik sebagai wakil rakyat, Produk-produk UMKM ini nantinya mempunyai tempat yang lebih di hati masyarakat.



Jalani Reses DPR RI

Hidayat Nur Wahid Dibanjiri Pertanyaan Soal RUU HIP

Soal penolakan RUU HIP itu terbukti bukan hanya menjadi isu dari Partai Islam, tetapi juga menjadi concern dari Partai Nasionalis, dan bukan hanya dari Ormas-Ormas Islam tapi juga Kristiani, Hindu, Budha dan bahkan Ormas non keAgamaan seperti Pemuda Pancasila dan Legiun Veteran RI. Jadi ini bukan isu kebangkitan kanan, tapi kebangkitan nasional,”

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

Jakarta (21/07) — Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta II, Hidayat Nur Wahid, saat melaksanakan reses DPR RI secara virtual karena faktor covid-19, tapi ternyata antusiasme dan efektivitasnya tidak kalah bila dibanding dengan bertemu langsung dengan Tokoh Masyarakat dan Warga di Dapil.

Dalam kesempatan reses itu, HNW memperoleh banyak pertanyaan dari warga dan para tokoh masyarakat dari Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sepuluhan Rancangan Undang-Undang

Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan RUU BPIP, karena mereka menilai RUU tsb banyak memuat ketentuan yang meresahkan, kontroversial, dan karenanya menjadi perhatian Rakyat banyak.

Beberapa pertanyaan tersebut, diantaranya, adalah sikap partai Islam di parlemen sejak awal terkait tidak masuknya TAP MPRS XXV/1966 yang melarang Partai Komunis Indonesia (PKI) ke dalam pertimbangan RUU HIP, dan adanya wacana untuk

mengubah RUU HIP menjadi RUU BPIP, hingga kehadiran Prabowo Subianto dalam konferensi pers mengubah RUU HIP menjadi RUU BPIP.

Salah seorang warga, Dandang Sudarno mempertanyakan mengapa yang terdengar hanya FPKS yang mengusulkan agar TAP MPRS Larangan PKI itu untuk masuk ke RUU HIP.

“Padahal di parlemen ada beberapa Partai Islam, dan bagaimana peluang ke depan?” tanyanya.

Hidayat Nur Wahid menjelaskan bahwa sejak awal memang Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) mempertanyakan secara tergas mengapa TAP MPRS no XXV/1966 tentang pelarangan PKI dan larangan penyebaran ajaran Komunisme tidak dimasukkan ke dalam RUU HIP.

Padahal, lanjutnya, TAP MPRS itu masih berlaku, dan dibanding dengan TAP-TAP MPR yang lain, lebih diperlukan untuk membentengi agar ideologi Pancasila tidak dikudeta lagi oleh ideologi yg bertentangan dengan Pancasila yaitu komunisme.



la menambahkan FPKS juga mengkritik dan mengusulkan agar sesuai dengan Pancasila yang final disahkan pada 18 Agustus 1945, maka TriSila dan Ekasila harus dihapus dari RUU HIP.

“Tapi mayoritas fraksi tidak menginginkan kritik dan saran FPKS tersebut. Sehingga wajar bila FPKS secara formal memutuskan untuk tidak ikut menandatangani pengusulan RUU HIP ke rapat paripurna DPR,” ujarnya.

Hidayat mengungkapkan sebenarnya bukan hanya Partai Islam PKS yang menolak, ada juga Partai Demokrat yang menolak RUU HIP. Sementara PPP dan PAN juga mengusulkan agar TAP MPRS itu dimasukkan ke dalam RUU HIP.

“Namun, dalam dokumen resmi di DPR, yang menolak

tanda tangan pengusulan RUU HIP ke rapat paripurna DPR faktanya memang hanyalah FPKS dan Fraksi Partai Demokrat,” ujarnya saat berdialog dengan konstituente secara virtual di Jakarta, Minggu (20/07/2020).

Kemudian, lanjut Hidayat, setelah demonstrasi besar-besaran ANAK (Aliansi Nasional Anti Komunis) NKRI di depan gedung DPRRI, posisi politik saat ini adalah seluruh fraksi di DPR RI telah setuju agar mengakomodasi dan memasukkan TAP MPRS tersebut ke dalam konsideran Mengingat dalam RUU HIP dan untuk menghapus Trisila dan Ekasila dari RUU HIP.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Awali Reses

Syaikhu Berikan 13 Sapi Kurban di 3 Kabupaten

Idul Adha kali ini, adalah momentum tepat bagi masyarakat, khususnya umat Islam, untuk belajar yakin dan taat kepada perintah Allah. Sebab pada situasi pandemi Corona yang berpotensi pada lahirnya resesi ekonomi, kedekatan kita kepada Allah memiliki peran sangat penting.

H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi V DPR RI

Bekasi (23/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikhu memberikan 13 sapi kurban kepada masyarakat di tiga kabupaten. Yakni Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta. Ketiga daerah ini merupakan Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Barat, tempat Syaikhu berjuang dalam Pileg 2019 lalu.

Hewan kurban tersebut diserahkan Syaikhu secara simbolis di Desa Mekarasih, Kecamatan Banyusari, kabupaten Karawang, Rabu, (22/07/2020). Kegiatan ini sekaligus mengawali reses Syaikhu.

Menurut Syaikhu,

penyerahan hewan kurban ini sebagai bentuk komitmennya untuk terus membantu masyarakat di dapilnya.

"Ini wujud komitmen saya untuk terus membantu masyarakat setiap kali ada reses," ujar Syaikhu.

Idul Adha kali ini, kata Syaikhu, adalah momentum tepat bagi masyarakat, khususnya umat Islam, untuk belajar yakin dan taat kepada perintah Allah. Sebab pada situasi pandemi Corona yang berpotensi pada lahirnya resesi ekonomi, kedekatan kita kepada Allah memiliki peran sangat penting.

"Situasi sekarang sangat

sulit. Ini adalah momentum kita untuk yakin dan taat pada Allah," jelas Syaikhu yang duduk di Komisi V DPR RI itu.

Keyakinan dan ketaatan itu telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail ditaati. Ketaatan tersebut akhirnya membawa keberkahan bagi keluarga Nabi Ibrahim as.

"Kita harus mengambil hikmah dari kisah tersebut. Sehingga beban hidup yang kita pikul saat ini akan dimudahkan Allah," kata Syaikhu.



Reses di Dapil,

Hermanto Serahkan Bentor di Padang dan Solok

Pengadaan bentor ini merupakan salah-satu realisasi anggaran penanganan covid-19. Bentor sengaja dilengkapi tangki dan pompa agar bisa digunakan untuk membersihkan lingkungan dengan penyemprotan disinfektan. Lingkungan yang bersih merupakan salahsatu upaya mencegah penyebaran wabah covid-19”

Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (25/07) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Hermanto dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan menyerahkan 5 unit kendaraan roda tiga (bentor) bantuan Pemerintah.

Empat unit bentor untuk Kota Padang dan 1 unit untuk Kota Solok. Bentor tersebut masing-masing dilengkapi tangki air dan pompa.

“Pengadaan bentor ini merupakan salahsatu realisasi anggaran penanganan covid-19. Bentor sengaja dilengkapi tangki dan pompa agar bisa

digunakan untuk membersihkan lingkungan dengan penyemprotan disinfektan. Lingkungan yang bersih merupakan salahsatu upaya mencegah penyebaran wabah covid-19”, papar Hermanto.

Disamping untuk mencegah penyebaran covid-19, lanjutnya, bentor bisa dimanfaatkan untuk mengangkut sampah dari rumah- rumah warga masyarakat ke tempat pembuangan sementara.

“Setelah fungsi utamanya

selesai, bentor juga bisa dipakai untuk menunjang berbagai aktivitas ekonomi masyarakat oleh operator dan pengelolanya”, ucap legislator FPKS ini.

“Jadi, bantuan bentor ini memiliki fungsi ganda yaitu mencegah penyebaran covid dan pemulihan ekonomi masyarakat”, imbuh Hermanto.

Di Padang, Hermanto menyerahkan bentor kepada Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah yang didampingi anggota DPRD Kota Padang Pun Ardi. Selanjutnya 4 bentor tersebut diserahkan oleh Mahyeldi kepada RSUD dr. Rasidin, Yayasan Amilla Sehati, pengurus RW 14 Lubuk Buaya dan pengurus RW 07 Parupuk Tabing. Sedangkan di Kota Solok, Hermanto menyerahkan bentor kepada Yayasan Ahlu Qur'an.



Dorong Produktivitas Petani

Slamet Salurkan Hand Traktor di Kota Sukabumi

Menyerahkan bantuan dari Kementan untuk 10 kelompok tani di Kota Sukabumi berupa hand traktor. Jadi memang orientasi kementerian masih menggenjot produksi, sehingga bantuan yang diberikan lebih kepada bagaimana meningkatkan produktivitas

drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Sukabumi (27/07) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Slamet terus berkomitmen dalam mendorong produktivitas petani dalam masa Pandemi Covid-19 ini.

Hal itu terbukti dengan disalurkan bantuan berupa hand traktor kepada 10 kelompok tani di Kota Sukabumi.

"Menyerahkan bantuan dari Kementan untuk 10 kelompok tani di Kota Sukabumi berupa hand traktor. Jadi memang orientasi kementerian masih menggenjot produksi, sehingga bantuan yang diberikan lebih kepada bagaimana meningkatkan produktivitas," kata Slamet

kepada awak media saat melakukan penyerahan hand traktor kepada para perwakilan kelompok tani di Sub Terminal Agribisnis (STA) Bungbulang Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, Senin (27/07).

Di lokasi yang sama, Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengucapkan terima kasih atas bantuan untuk memaksimalkan sektor pertanian tersebut.

"Kami yakin ini sebagai tanggungjawab beliau sebagai Anggota DPR RI kepada warga. Semoga dengan adanya bantuan pertanian ini, dapat meningkatkan pertanian dan memaksimalkan potensi di Kota Sukabumi," tutur Fahmi.

Sementara itu, salah

seorang petani bernama Pepen Supendi (64 tahun) mengungkapkan, bantuan hand traktor tersebut akan bermanfaat bagi peningkatan produksi pertanian mereka.

"Sebagai petani saya merasa bersyukur ada bantuan traktor ini dan semoga bermanfaat. Untuk meningkatkan produksi dan jangan sampai terlambat musim tanam. Jadi sangat terbantu adanya traktor ini," pungkas Pepen yang merupakan anggota dari Kelompok Tani Mekar Tani 1 Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi.



Masa Reses

Andi Akmal Salurkan Bantuan ke Kabupaten Bone

Saya sudah berkomitmen, dan kali ini merealisasikan komitmen saya untuk menyampaikan bantuan peningkatan agar ada peningkatan kesejahteraan bagi petani di Mare dan Sulawesi Selatan secara umum

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Kabupaten Bone (27/07) — Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin pada masa reses bulan Juli 2020 ini turun ke daerah pemilihannya, Kabupaten Bone untuk menyerahkan berbagai bantuan baik dari pribadi maupun membawa program dari pemerintah.

Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sudah menjabat Dua priode ini, menyerahkan bantuan di Desa Ujung tanah Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.

"Saya sudah berkomitmen, dan kali ini

merealisasikan komitmen saya untuk menyampaikan bantuan peningkatan agar ada peningkatan kesejahteraan bagi petani di Mare dan Sulawesi Selatan secara umum", kata Andi Akmal Pasluddin.

Bantuan berupa Combine Harvester kepada kelompok tani "Mattake ulaweng" desa Tellongeng, Kecamatan Mare yang merupakan hasil aspirasi dan perjuangan yang telah Akmal lakukan untuk peningkatan kesejahteraan petani.

Bantuan alsintan ini, lanjut Akmal, agar para petani dalam menjalankan aktivitasnya lebih mudah dan lancar terutama pada kegiatan pasca panen. Ucapan terima kasih para

kelompok tani langsung disampaikan kepada legislator asal Sulawesi Selatan II ini yang memenuhi janji-janjinya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapilnya.

"Kita semua berupaya yang terbaik dalam menjalankan proses bernegara ini ya. Kalo waktunya reses ya kita turun lapangan bertemu rakyat. Bukan sidang. Setelah berbagai temuan di lapangan dan mengumpulkan berbagai persoalan di lapangan, ada saatnya kita sidang membahasnya di masa sidang yang telah termaktub dalam peraturan DPR yang selama ini sudah berjalan", tutup Andi Akmal Pasluddin.



Kunjungi Aceh Jaya di Masa Reses

Rafli Serahkan Bantuan Bina Lingkungan

Bantuan tersebut, diperuntukan bagi kelanjutan pembangunan masjid Jami' Al Ikhlas Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Satu Masjid yang terletak di Desa Tuwi Eumpeuk tersebut menaungi empat Desa sekitarnya terlihat sedang tahap penyelesaian pembangunan

RAFLI

Anggota Komisi VI DPR RI

Aceh Jaya (28/07) — Kunjungan Kerja Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Rafli ke Kabupaten Aceh Jaya, dilakukan Senin (27/07/2020), disertai penyerahan secara simbolis bantuan bina lingkungan senilai Rp 85 Juta.

Bantuan tersebut, kata Rafli, diperuntukan bagi kelanjutan pembangunan masjid Jami' Al Ikhlas Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya.

"Satu Masjid yang terletak di Desa Tuwi Eumpeuk tersebut menaungi empat Desa sekitarnya terlihat sedang tahap penyelesaian pembangunan", ungkapnya.

Program bina lingkungan yang dimiliki sejumlah perusahaan Plat Merah BUMN sebagai mitra kerjanya di Komisi VI DPR RI, diarahkan politisi PKS itu pada kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat.

"Ada ratusan perusahaan milik BUMN bisa lakukan hal seperti ini, yakni program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat diantaranya melalui program bina lingkungan" Ujarnya

Senada itu, dalam sambutannya saat menyerahkan bantuan, Rafli mengatakan bantuan yang bersumber dari program

bina lingkungan ini direkomendasikan untuk pembangunan rumah ibadah dan fasilitas umum yang menyebar di seluruh Provinsi Aceh, khususnya di dapil 1.

"Hari ini bersama PT Angkasa Pura II kita membantu lanjutan pembangunan Masjid Al Ikhlas Desa Tuwi Eumpeuk, Pucok Panga, Aceh Jaya," Ucap Rafli

Penyerahan bantuan senilai Rp. 85 juta pada tahap ini, diterima oleh panitia pembangunan masjid setempat, Teungku Iskandar, disaksikan kepala Desa Tuwi Eumpeuk, Teungku Imran.

"Tahap ini kita serahkan sebesar 85 Juta, dan tahap berikutnya akan disalurkan kemudian sejumlah Rp 50 Juta lagi, Insyaallah, semoga bermanfaat untuk masyarakat" Imbuhnya

Hadir pada kegiatan itu, Anggota DPR RI Rafli, Ketua DPD PKS Aceh Jaya, Teuku Nova Iskandar, Perwakilan Pejabat Kantor Pusat PT Angkasa Pura II, Supriyadi, Sejumlah pengurus Masjid Jami' Al Ikhlas, Tokoh masyarakat dan pemuda setempat.



Saat Reses

Aleg PKS Bantu Warga Korban Kebakaran

“Tadi saat sedang melakukan kunjungan reses, saya mendengar ada warga yang mengalami musibah kebakaran pada hari sabtu lalu. Makanya saya langsung mengunjungi dan menyampaikan bantuan dari PKS. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban para korban yang rumahnya terbakar,

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Garut (27/07) — Kebakaran meludeskan sejumlah rumah warga di kampung Cibugel RT 01 RW 01 desa Cikarag kecamatan Malangbong Garut, Sabtu, (25/7). Kebakaran terjadi akibat dari korsleting listrik.

Toriq Hidayat, Anggota DPR RI Fraksi PKS yang sedang melakukan kunjungan Reses ke daerah pemilihannya, Garut, didampingi oleh pemerintah desa Cikarag dan tim dari PKS menempatkan diri untuk mengunjungi dan memberikan bantuan. Beliau berharap bantuan dari PKS ini dapat

meringankan beban korban.

“Tadi saat sedang melakukan kunjungan reses, saya mendengar ada warga yang mengalami musibah kebakaran pada hari sabtu lalu. Makanya saya langsung mengunjungi dan menyampaikan bantuan dari PKS. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban para korban yang rumahnya terbakar,” ujar Toriq pada Senin (27/7).

Anggota Komisi I ini mengungkapkan bahwa ada tiga rumah warga yang menjadi korban pada musibah ini, yakni

rumah Nia Kania, Yayah dan Juju. Semua rumahnya mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dihuni.

“Meski rumah korban mengalami kerusakan, tapi masih bersyukur tidak ada korban jiwa. Keselamatan jiwa itu lebih penting, urusan harta benda masih bisa dicari. Yang penting para korban itu bisa bersabar, tabah menghadapi musibah, tetap berupaya untuk melanjutkan hidup dan semoga Allah segera mengganti semua yang hilang atau rusaknya itu,” ungkap Toriq.

Sementara, Nia Kania mewakili korban lainnya menyampaikan ucapan terima kasih. Ia sangat bersyukur karena ada anggota DPR RI yang memiliki rasa empati dan peduli. Mau berkunjung dan memberikan bantuan.

“Kepada pak haji dan PKS, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan pak haji dan PKS, semoga pak haji diberikan kesehatan dan terus dapat membantu masyarakat,” ungkapnya





Selamat Hari Anak Nasional

23 Juli 2020

Anak adalah penerus bangsa.
Karenanya bimbingan dan keteladanan kita
berperan penting dalam mendidik mereka.
Mari bersemangat menjadi pembimbing
dan teladan bagi anak Indonesia

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Momentum Hari Anak Nasional

Nevi: Manfaatkan Waktu Berharga Anak bersama Keluarga di Masa Pandemi

Peringatan HAN di masa pandemi Covid-19 ini adalah momentum untuk meningkatkan kepedulian semua pilar bangsa Indonesia, baik orangtua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media massa dan pemerintah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (23/07) — Seluruh aktivitas masyarakat yang mengharuskan mengikuti protokol kesehatan, membuat aktivitas di rumah menjadi dominan. Berkumpulnya keluarga di rumah terutama semakin menyenagkan anak-anak bertemu dengan orang tua yang juga sebagai dampak sekolah dari rumah (SFH) merupakan waktu berharga anak bersama keluarga.

Hal ini dikatakan Anggota DPR RI asal Sumatra Barat yang

diduduk di Komisi VI, Nevi Zuirina, pada moment Hari Anak Nasional, 23 Juli 2020.

Nevi yang juga ketua HIMPAUDI (Himpunan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia) Provinsi Sumatera Barat menegaskan, bahwa saat ini anak-anak adalah generasi penerus bangsa, buah hati orang tua dan keluarga, sangat penting agar masa depan mereka terjamin dan selamat dari

Pandemi 2020 ini.

Keadaan Warga masyarakat disarankan tetap dirumah akan berlangsung terus hingga Obat dan vaksin Corona tersedia, yang hingga saat ini masih belum ditemukan.

"Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa Indonesia terhadap perlindungan anak Indonesia agar tumbuh dan berkembang secara optimal, dengan mendorong keluarga Indonesia menjadi lembaga pertama dan utama dalam memberikan perlindungan kepada anak. Upaya ini akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air di masa pandemi Covid-19", ucap Nevi Zuirina.

Politisi PKS ini menambahkan, Peringatan HAN di masa pandemi Covid-19 ini adalah momentum untuk meningkatkan kepedulian semua pilar



bangsa Indonesia, baik orangtua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media massa dan pemerintah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Melalui kepedulian dalam menghormati, menghargai, dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi.

Nevi sangat menekankan kepada orang tua elemen bangsa kita, bahwa sering bertemunya orang tua dan anak jangan dijadikan beban yang malah akan mengganggu keharmonisan keluarga.

"Jangan sampai ada kecenderungan meningkatnya kekerasan terhadap anak karena pandemi Covid 19. Di beberapa propinsi, Ada indikasi kenaikan kekerasan kepada anak dimasa pandemi hampir sekitar 25%. Tapi harus disisir terus untuk validasi data ini",

ungkapnya.

"Pandemi ini sangat berimplikasi pada semua aspek, mulai dari ekonomi, gaya hidup, cara bekerja, cara belajar hingga tumbuh kembang anak yang berubah drastis akibat aktivitas sosialnya. Kurangnya kesempatan bermain dan belajar serta meningkatnya kasus kekerasan selama pandemic sebagai akibat diterapkannya kebijakan jaga jarak maupun belajar dan bekerja di rumah. Tumbuh kembang anak sangat ditentukan dengan kegembiraan mereka. Jadi mesti kita jaga betul anak-anak kita untuk tetap tumbuh menjadi generasi unggul untuk berkompetisi di masa depan", jelas Nevi yang juga ketua TP PKK Sumatera Barat ini

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Refleksi Hari Anak Nasional

Iskan: Hak Anak Harus Terpenuhi Ditengah Pandemi

Tidak boleh ada jurang sosial yang tercipta dari si kaya dan si miskin, maupun yang punya handphone dengan yang tidak punya handphone karena dalam dunia pendidikan, semua anak dari kasta sosial manapun harus mendapatkan hak yang sama

H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (24/07) — Hari Anak Nasional (HAN) menjadi momen untuk kembali melakukan refleksi pemenuhan hak anak, terutama di tengah masa pandemi virus corona seperti saat ini.

Anggota komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis yang juga merupakan mitra kerja KPAI (komisi perlindungan anak Indonesia) mengatakan anak mempunyai hak.

"Hak anak diantaranya hak

atas pengasuhan, hak atas kesehatan, hak atas perlindungan, hingga hak atas pendidikan," papar Iskan.

Pada situasi pandemi corona virus seperti saat ini, lanjut iskan, yang paling penting bagi anak saat ini adalah mengenai pendidikan dan pengasuhan serta perlindungan kesehatannya.

Sejak wabah corona virus terjadi di Tanah Air, sebagian besar anak-anak menjalani pembelajaran dari rumah.

Sehingga opsi daring (belajar online) menjadi solusi yang diterapkan pemerintah. Dikarenakan anak termasuk rentan terinfeksi penularan virus covid-19.

"Apalagi dalam masa adaptasi kebiasaan baru, anak-anak juga perlu teredukasi dengan terbiasanya protokol kesehatan. Sehingga perlu langkah yang serius dari pemerintah terhadap hak pendidikan bagi anak Indonesia. Belajar daring yang sudah berjalan saat ini, banyak menimbulkan catatan kritis saya bagi pemerintah" tegas Iskan

Selain itu, lanjut Iskan, pihaknya juga mendorong KPAI agar memperhatikan nasib anak ditengah pandemi yang masih berlangsung khususnya dalam dunia pendidikan.

"Belajar daring itu menimbulkan pengeluaran yang double bagi orang tua si anak, selain menyiapkan fasilitas handphone bagi anak, pembelian paket data juga menjadi pengeluaran tambahan rumah tangga, belum lagi uang SPP yang tetap wajib dibayarkan oleh orang tua" ungkapnya

Yang lebih parah, lanjut legislator PKS ini Pemerintah harus memperhatikan psikologis anak saat ini, karena sudah di survei oleh beberapa lembaga bahwa masih banyak anak yang tidak dapat mengakses pembelajaran secara daring.



"Kendala orang tua mulai dari ketidakmampuan membeli fasilitas handphone atau membeli paket data bahkan ketiadaan jaringan di tempat tinggal nya berada" tegas iskan

Iskan menambahkan jangan sampai proses pembelajaran daring ditengah pandemi ini memunculkan masalah baru bagi psikologis anak.

"Tidak boleh ada jurang sosial yang tercipta dari si kaya dan si miskin, maupun yang

punya handphone dengan yang tidak punya handphone karena dalam dunia pendidikan, semua anak dari kasta sosial manapun harus mendapatkan hak yang sama," tandas Iskan.

"Selamat hari anak nasional tahun 2020, semoga Pemerintah bisa hadir dalam penuntasan dan pemenuhan hak-hak anak di tengah pandemi virus covid-19 khususnya dalam dunia pendidikan dan kesehatan" tutup Iskan.

Rancangan Alokasi Waktu **Rapat dan Reses**

Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020



Masa Persidangan IV Tahun
Sidang 2019-2020 15 Juni
2020 s.d. 13 Agustus 2020
Keputusan Rapat Konsultasi
Pengganti Rapat Bamus
Tanggal 30 April 2020



MASA SIDANG

15 Juni 2020 s/d 16 Juli 2020

32 Hari Kalender
24 Hari kerja



MASA RESES

17 Juli 2020 s/d 13 Agustus 2020

28 Hari Kalender
19 Hari kerja

*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*





Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

KANAL RESMI FRAKSI PKS DPR RI



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)



Twitter
[@fraksipksdprri](https://twitter.com/fraksipksdprri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI

fraksi.pks.id